




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BPK RI 2021

INDEPENDENSI – INTEGRITAS - PROFESIONALISME



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT UTAMA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon 021-25549000 Ext.3226 Faksimile 021-57852965

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen BPK.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Jakarta, 25 Februari 2022
Inspektur Utama,**

**I Nyoman Wara
NIP 196707091988031004**

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja BPK Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Penerbitan Laporan Kinerja BPK adalah wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan ini merupakan perwujudan pencapaian Visi dan Misi BPK sebagaimana tercantum dalam Renstra BPK 2020-2024. Laporan Kinerja juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja BPK kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian, harapan para pemangku kepentingan akan suatu lembaga *supreme audit institution* yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dimana dunia global sedang menghadapi era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), Industri 4.0, dan pada saat yang bersamaan menghadapi penyebaran Pandemi Covid-19. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, berbagai upaya dan capaian telah BPK lakukan untuk mempertahankan kinerja BPK dan berkontribusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tahun 2021, BPK terpilih sebagai Wakil Ketua *United Nation (UN) Panel of External Auditors*, inisiator pembentukan SAI 20, bergabung dalam proyek "*The Chandler Sessions on Integrity and Corruption*" dan merumuskan *Strategic Foresight: Membangun Kembali Indonesia Pasca COVID-19*. BPK juga mengembangkan kapasitas organisasi melalui pengembangan BPK *Digital Enterprise Architecture* sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, pengembangan data dan informasi serta infrastruktur SPBE, dan melakukan Revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sesuai dengan perkembangan standar internasional dan praktik-praktik terbaik.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2020 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK atas 47 indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun kedua Renstra BPK 2020-2024 maka pada Tahun 2021 BPK melakukan penyesuaian atas beberapa IKU/IK baru agar lebih selaras dengan dinamika organisasi saat ini dan mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi.

KATA PENGANTAR

Upaya perubahan yang dilakukan BPK secara cepat untuk mengadaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan tugasnya selama masa Pandemi COVID-19 membuahkan hasil nyata. Meski dalam situasi penuh keterbatasan, Nilai Kinerja BPK Tahun 2021 meningkat dibandingkan Nilai Kinerja Tahun 2020 yaitu mencapai angka **102,47** dari sebelumnya di angka **98,68**. Capaian tersebut adalah hasil upaya bersama karena dalam situasi pandemi yang membutuhkan banyak adaptasi kebiasaan baru, dibutuhkan sinergi dan komitmen semua satuan kerja secara optimal untuk mencapai tujuan kelembagaan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang telah mendukung tugas dan fungsi BPK.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Februari 2022

Bahtiar Arif
Sekretaris Jenderal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	XI
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Tentang BPK.....	19
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	35
A. Perencanaan Strategis.....	35
B. Perencanaan Kinerja Tahunan.....	47
C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi.....	51
D. Evaluasi Perencanaan Strategis.....	52
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	56
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	57
IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK.....	60
IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan.....	63
IKU 3 – Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi.....	65
Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis.....	67
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.....	80

DAFTAR ISI

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	97
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.....	106
Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.....	116
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan	125
Indikator Kinerja Generik.....	134
B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	151
Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	151
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	154
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	155
D. Tantangan Masa Depan.....	159
BAB 4 PENUTUP	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional	32
Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2021 dan 2020.....	57
Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1 Periode Tahun 2019-2021.....	60
Tabel 5 - Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	61
Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 2 Periode Tahun 2019-2021.....	63
Tabel 7 - Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024.....	64
Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 3 Periode 2019-2021.....	65
Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024.....	66
Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1 Tahun 2019-2021	68
Tabel 11 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2021-2024.....	68
Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	69
Tabel 13 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	70
Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1 Tahun 2019-2021	70
Tabel 15 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	71
Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1 Tahun 2019-2021	71
Tabel 17 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	72
Tabel 18 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	73
Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	73
Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	74
Tabel 21 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	74
Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	75
Tabel 23 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	75
Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	76
Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 8 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024	77

DAFTAR TABEL

Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	77
Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 9 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	78
Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1 Tahun 2019-2021.....	78
Tabel 29 - Perbandingan Realisasi IKU 10 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	79
Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	82
Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	82
Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	83
Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	83
Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	84
Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	84
Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	85
Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	85
Tabel 38 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	86
Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	86
Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	87
Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	87
Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 2 Tahun 2019-2021.....	88
Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	88
Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021.....	89
Tabel 47 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	90
Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021.....	90
Tabel 49 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	91
Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 51 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	93
Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019–2021	94
Tabel 53 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	95
Tabel 54 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019–2021	95
Tabel 55 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	96
Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3 Tahun 2019–2021	98
Tabel 57 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	99
Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3 Tahun 2019–2021	99
Tabel 59 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	100
Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3 Tahun 2019–2021	100
Tabel 61 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	101
Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3 Tahun 2019–2021	102
Tabel 63 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	102
Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3 Tahun 2019–2021	103
Tabel 65 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	104
Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3 Tahun 2019–2021	104
Tabel 67 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	105
Tabel 68 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4 Tahun 2019–2021	107
Tabel 69 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	107
Tabel 70 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4 Tahun 2019–2021	108
Tabel 71 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	108
Tabel 72 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4 Tahun 2019–2021	109

DAFTAR TABEL

Tabel 73 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	109
Tabel 74 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4 Tahun 2019-2021	110
Tabel 75 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	110
Tabel 76 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4 Tahun 2019-2021	111
Tabel 77 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	111
Tabel 78 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4 Tahun 2019-2021	112
Tabel 79 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	113
Tabel 80 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4 Tahun 2019-2021	113
Tabel 81 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	114
Tabel 82 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 4 Tahun 2019-2021	114
Tabel 83 - Perbandingan Realisasi IKU 8 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	115
Tabel 84 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5 Tahun 2019-2021	117
Tabel 85 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	118
Tabel 86 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5 Tahun 2019-2021	119
Tabel 87 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	119
Tabel 88 - Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2021	120
Tabel 89 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5 Tahun 2019-2021	120
Tabel 90 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	120
Tabel 91 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5 Tahun 2019-2021	121
Tabel 92 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	122
Tabel 93 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5 Tahun 2019-2021	122
Tabel 94 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	123

DAFTAR TABEL

Tabel 95 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 5 Tahun 2019-2021	123
Tabel 96 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	124
Tabel 97 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6 Tahun 2019-2021	126
Tabel 98 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	126
Tabel 99 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6 Tahun 2019-2021	127
Tabel 100 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	127
Tabel 101 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6 Tahun 2019-2021	128
Tabel 102 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	129
Tabel 103 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6 Tahun 2019-2021	130
Tabel 104 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	130
Tabel 105 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6 Tahun 2019-2021	131
Tabel 106 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	131
Tabel 107 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6 Tahun 2019-2021	132
Tabel 108 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	133
Tabel 109 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2019-2021	135
Tabel 110 - Perbandingan Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	136
Tabel 111 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019-2021	138
Tabel 112 - Perbandingan Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	139
Tabel 113 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2018-2020	141
Tabel 114 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024	142
Tabel 115 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2018-2020	144

DAFTAR TABEL

Tabel 116 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	145
Tabel 117 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2018-2020.....	146
Tabel 118 - Perbandingan Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	148
Tabel 119 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2019-2021.....	149
Tabel 120 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024.....	150
Tabel 121 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran tahun 2021 atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)	20
Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan.....	23
Gambar 3 - Model Kematangan Organisasi BPK.....	25
Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK	26
Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK	27
Gambar 6 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024	36
Gambar 7 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	39
Gambar 8 - <i>Focal Point</i> BPK 2020-2024	42
Gambar 9 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024	46
Gambar 10 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi	47
Gambar 11 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2021.....	50
Gambar 12 - Siklus Pengukuran Kinerja	51
Gambar 13 – Monitoring dan Evaluasi.....	53
Gambar 14 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja	154
Gambar 15 – Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2021.....	155

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPK Tahun 2021 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban BPK dalam menggunakan anggaran. Laporan Kinerja menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK dalam upaya mewujudkan visi dan misi BPK yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020—2024.

Dalam melaksanakan mandatnya, BPK telah menetapkan visi dalam Renstra BPK 2020 - 2024 yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara”. Dalam Renstra 2020 – 2024, BPK menetapkan tiga misi yaitu: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Renstra BPK 2020-2024 juga memuat Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024, yaitu meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, maka ditetapkan enam Strategi dari aspek pemeriksaan maupun aspek kelembagaan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021, telah ditetapkan tiga IKU BPK *Wide* yang merupakan komitmen Pimpinan dan Pelaksana BPK. Skor Kinerja BPK *Wide* tahun 2021 mencapai **102,47** atau meningkat sebesar **3,79** poin dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar **98,68**. Capaian skor kinerja tersebut merupakan realisasi dari tiga IKU berikut ini:

- IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dengan realisasi 74,19% atau capaian sebesar 101,63%;
- IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan dengan realisasi 4,25 (Sangat Memuaskan) atau capaian sebesar 101,19%; dan
- IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 88,17% atau capaian sebesar 108,48% (hasil pengukuran tahun 2020 karena hasil pengukuran tahun 2021 belum terbit).

Dari capaian-capaian yang belum dapat memenuhi target kinerja, BPK berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan mandiri Modul Pembelajaran 101 atas Manajemen Risiko, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dan SAI PMF sebagai percepatan *transfer knowledge* ke Pelaksana BPK. Sebagai bagian dari pengembangan manajemen pengetahuan maka kegiatan Forum Manajer IKU diubah menjadi Forum Pengelola Kinerja dengan mengikutsertakan tidak hanya pengelola kinerja namun juga pengelola pengetahuan secara

daring. Pada masa yang ada datang, kegiatan ini akan dilaksanakan secara lebih komprehensif dengan melibatkan Pengelola Perubahan dan Pengelola Risiko.

2. Optimalisasi penerapan SPKN, PMP, PMPP, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam standar pemeriksaan, maka pada tahun 2021 BPK telah memulai revisi SPKN. Saat ini sedang dilaksanakan *public hearing* Draft Eksposeur SPKN sehingga revisi ini akan selesai pada tahun 2022.
3. Mengidentifikasi dan menerapkan prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar selama masa pandemi COVID-19. Penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat dan penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif yang didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan, serta menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK.
5. Pembangunan dan pengembangan budaya kerja satuan kerja di lingkungan BPK, pembangunan zona integritas, sosialisasi/diseminasi mengenai budaya kerja, nilai dasar BPK, penyiapan Program Inisiatif Strategis (IS) Sistem Manajemen Integritas, pembangunan media sosialisasi berbasis *e-learning* yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dalam rangka penyesuaian masa pandemi.
6. Mengembangkan BPK *Corporate University* (BPK CorpU) dan mengalihkan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan. Untuk meningkatkan kualitas layanan kediklatan telah dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.
7. Pelaksanaan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk FGD terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK dan sosialisasi produk hukum atas produk hukum BPK; serta Meningkatkan kualitas pendampingan keterangan ahli dan penanganan perkara yang melibatkan BPK baik di persidangan maupun di luar persidangan.
8. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan sistem merit, pengelolaan keuangan BPK secara andal, transparan, akuntabel dan modern, pengelolaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan lingkungan dan efisiensi energi dalam rangka menuju *eco-office* dan

smart office, peningkatan fungsi monitoring implementasi kebijakan BPK serta penerapan pola kerja berbasis sistem informasi disertai peningkatan keamanan akses data dan informasi.

9. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif antara BPK dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP, mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TLHRP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian TLHRP yang dilakukan pemerintah/entitas;
10. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) sebagai sarana percepatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, melaksanakan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD) yang terintegrasi, dan mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TP/TGR dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Selain berupaya mencapai Sasaran Strategis dan Strategi, BPK juga selalu berupaya meningkatkan efisiensi organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap Strategi antara lain:

1. Strategi 1 "Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis": BPK melakukan rapat internal dan eksternal melalui *video conference*. Misalnya, dalam mempersiapkan Pendapat *Foresight*, BPK melaksanakan diskusi dengan ahli dari berbagai negara. Semua diskusi dilakukan melalui *video conference*. Hal tersebut berdampak pada penghematan anggaran.
2. Strategi 2 "Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif": BPK mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan dan meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
3. Strategi 3 "Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal": upaya efisiensi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal dilakukan transformasi digital Itama, optimalisasi pemanfaatan Aplikasi WASMA (Pengawasan Itama) dalam rangka mempermudah dan meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Itama terhadap satuan kerja, penyempurnaan aplikasi PPG, WBS, dan beberapa aplikasi yang pada tahun 2021 masih dalam proses penyusunan *blue print*.
4. Strategi 4 "Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara": efisiensi dilakukan dengan mengembangkan BPK CorpU sehingga pegawai BPK bisa membangun budaya "*Learning from Everywhere*". Dengan adanya CorpU, pegawai BPK tidak harus ke Badiklat PKN bila ingin meningkatkan kompetensinya. BPK CorpU mengoptimalkan platform pengembangan kompetensi yang telah ada seperti Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (SISDIKLAT). Selain itu, Badiklat PKN juga mengembangkan platform *digital learning system* dengan dukungan teknologi seperti *MOOC (Massive Online Open Course)*. MOOC mengalihkan sebagian besar pelaksanaan

diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS) serta mendorong pelaksanaan diklat secara mandiri oleh masing-masing satuan kerja yang telah disetujui oleh Badiklat PKN sehingga menghemat biaya perjalanan dinas dan perjamuan.

5. Strategi 5 “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara”: melaksanakan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum dan melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya atas seluruh permintaan rekomendasi BPK dalam penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.
6. Strategi 6 “Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan”: Langkah yang dilakukan antara lain melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK, melakukan pemetaan terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker sebagai dasar dalam menyusun pola karier pegawai, melakukan integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK, melakukan penyelarasan pengembangan TIK di BPK dan menyusun perangkat lunak bidang teknologi informasi, melakukan identifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja dan menyusun rencana aksi penanganan risiko tersebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022, meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala), melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan menyusun rencana aksi penanganan risiko tersebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2021.

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama tahun 2021 BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional. Beberapa capaian penting BPK antara lain sebagai berikut.

1. BPK melalui Ketua BPK terpilih sebagai sebagai Wakil Ketua *United Nation* (UN) *Panel of External Auditors*;
2. BPK melalui Ketua BPK bergabung dalam proyek “*The Chandler Sessions on Integrity and Corruption*”;
3. BPK memprakarsai pembentukan SAI 20;
4. BPK merumuskan Pendapat (*Strategic Foresight*): “Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”;
5. BPK menerima penghargaan INTOSAI WGEA atas visualisasi hasil pemeriksaan DAS Citarum.
6. BPK menerima penghargaan “*Silver Winner*” untuk majalah Warta Pemeriksa edisi Maret 2020 dari PR Indonesia untuk Kategori Lembaga Sub Kategori Media Cetak;
7. BPK menerima penghargaan “BKN Award 2020” untuk kategori Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik dari Badan kepegawaian Negara (BKN);

RINGKASAN EKSEKUTIF

8. BPK meraih predikat sebagai “Badan Publik Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP);
9. BPK meraih Peringkat Kedua Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam kategori pagu sedang.

Atas capaian tersebut, BPK tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara terus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah dan dinamis.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

TENTANG BPK RI

- PROFIL DAN SEJARAH SINGKAT
- TUGAS DAN WEWENANG
- PEMANGKU KEPENTINGAN
- KEDUDUKAN DAN PERAN
- SUSUNAN ANGGOTA BPK RI
- STRUKTUR PELAKSANA BPK RI
- SUMBER DAYA
- *STRATEGIC ISSUE* BPK RI

BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, menyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penerapan peraturan tersebut di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya didukung dengan Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020—2024. Proses penyusunan indikator kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja di BPK dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. *Output* dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I, dan LAKIN BPK Tahun 2021.

B. Tentang BPK

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu BPK hanya mempunyai sembilan orang pegawai dan sebagai Ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, BPK dengan suratnya tanggal 12 April 1947 Nomor 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Untuk sementara, BPK RI masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu sebagai dasar bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR).

Dalam Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Pegawai Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 (LN Nomor 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.



Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu.

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK tersebut antara lain meliputi:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1));
2. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5));
3. menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1));
4. menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1));
5. melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)); dan

6. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/ daerah.

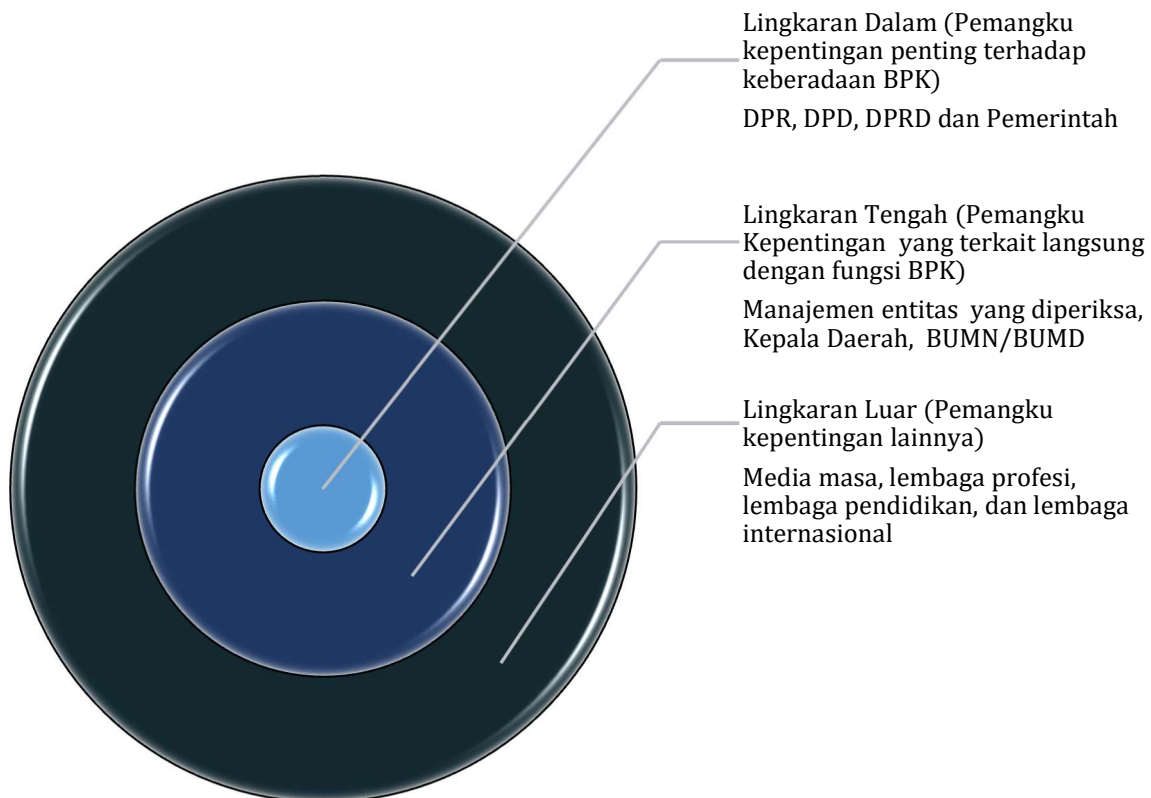
Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK.

Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya. Gambar 2 menunjukkan para pemangku kepentingan BPK.



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu, BPK juga mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media massa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan *database* KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain, BPK melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi berikut.



Gambar 3 - Model Kematangan Organisasi BPK

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sebagai suatu organisasi, BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK

BPK terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK beserta bidang tugasnya.



Ketua (merangkap Anggota) BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE



Wakil Ketua (merangkap Anggota) BPK RI
Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CfrA



Anggota I BPK RI
Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng.,
M.H., CFrA., CSFA.



Anggota II BPK RI
Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si.,
CFrA., CSFA.



Anggota III BPK RI
Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.



Anggota IV BPK RI
Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.



Anggota V BPK RI
Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA



Anggota VI BPK RI
Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E

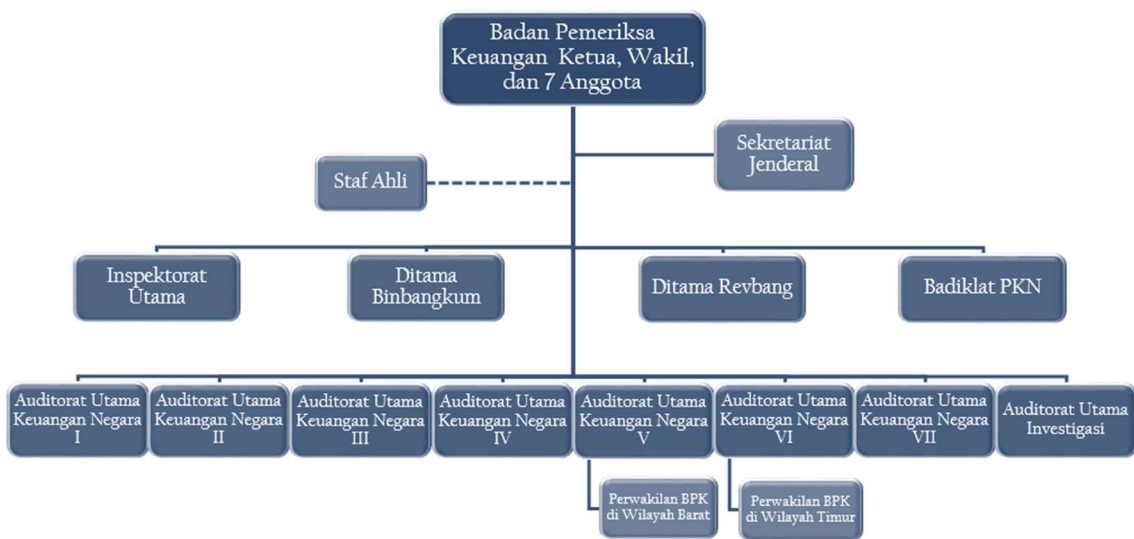


Anggota VII BPK RI
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

Struktur Pelaksana BPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Berikut Struktur Pelaksana BPK Tahun 2020.



Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja di bawahnya yaitu sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal

- Tugas: Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK
- Susunan Organisasi: Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi dan Biro Umum

Staf Ahli

- Tugas: Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, kecuali bidang tugas Sekretariat Jenderal, Itama, Direktorat Utama, AKN, dan Auditorat Utama Investigasi
- Susunan Organisasi: Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko

Badiklat PKN

- Tugas: Merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK dan pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
- Susunan Organisasi: Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN, Sekretariat Badiklat PKN, dan Badiklat PKN di lingkungan Badiklat PKN

Inspektorat Utama

- Tugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK
- Susunan Organisasi: Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas

Ditama Revbang PKN

- Tugas: Merumuskan perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan
- Susunan Organisasi: Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Ditama Binbangkum PKN

- Tugas: Memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau pegawai pada Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah
- Susunan Organisasi: Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah dan Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

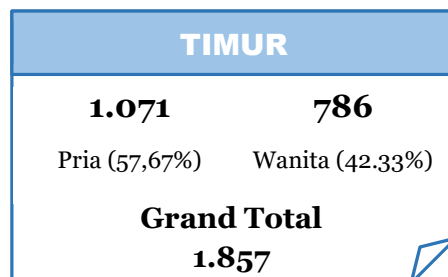
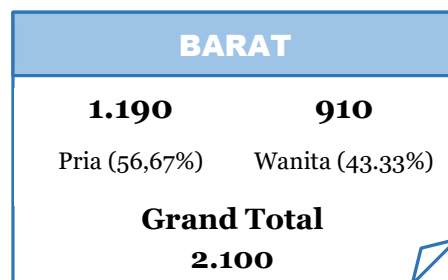
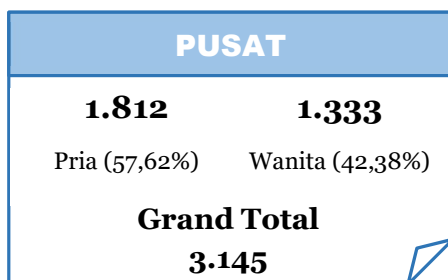
Keenam unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing Anggota, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK, yaitu sebagai berikut.

<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan • Susunan Organisasi: Auditorat I.A, Auditorat I.B, Auditorat I.C, Auditorat I.D, Sekretariat AKN I 	<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional • Susunan Organisasi: Auditorat II.A, Auditorat II.B, Auditorat II.C, Auditorat II.D, Sekretariat AKN II 	<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi • Susunan Organisasi: Auditorat III.A, Auditorat III.B, Auditorat III.C, Auditorat III.D, Sekretariat AKN III
<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur • Susunan Organisasi: Auditorat IV.A, Auditorat IV.B, Auditorat IV.C, Sekretariat AKN IV 	<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa. • Susunan Organisasi: Auditorat V.A, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN V, dan 16 BPK Perwakilan Wilayah Barat 	<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara VI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, dan Kemendikbud dan Perguruan Tinggi Badan Hukum, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua • Susunan Organisasi: Auditorat VI.A, Auditorat VI.B, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN VI, dan 18 BPK Perwakilan Wilayah Timur
<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Keuangan Negara VII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Keayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara) • Susunan Organisasi: Auditorat VII.A, Auditorat VII.B, Auditorat VII.C, Auditorat VII.D, Sekretariat AKN VII 	<p style="text-align: center;">Auditorat Utama Investigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli • Susunan Organisasi: Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Auditorat Investigasi Keuangan Daerah, Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Sekretariat Auditorat Utama Investigasi 	

Sumber Daya

BPK telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* di mana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan, dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir Tahun 2021, jumlah SDM BPK mencapai 7.102 orang dengan profil demografi sebagai berikut:



TINGKAT PENDIDIKAN

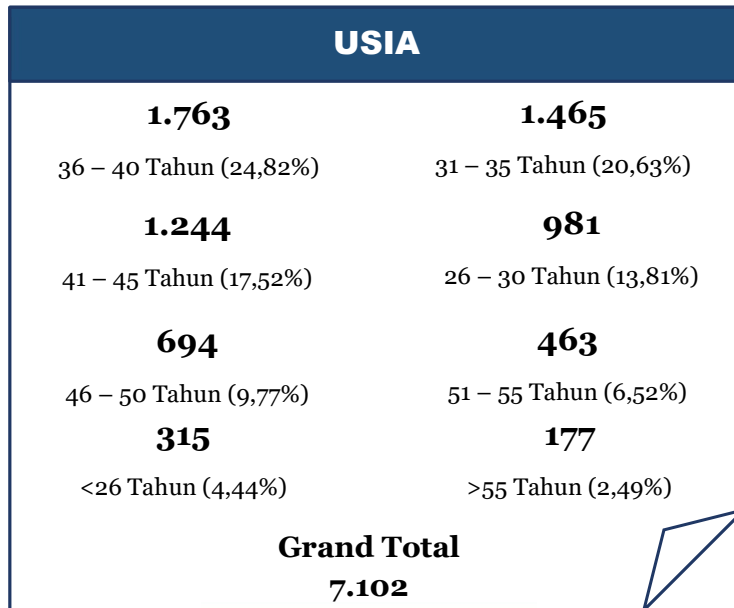
4.300 Sarjana (60,55%)	2.135 Pasca Sarjana (30,06%)
326 Diploma III (4,59%)	40 Doktor (0,56%)
301 Lainnya (4,24%)	Grand Total 7.102

JENIS JABATAN

4.393 JF Pemeriksa (61,86%)	1.671 Non Jabatan Fungsional (23,53%)
623 Struktural (8,77%)	415 JF Non Pemeriksa (5,84%)
Grand Total 7.102	

GOLONGAN

5.656 III (79,64%)	1.046 IV (14,73%)
397 II (5,59%)	3 I (0,04%)
Grand Total 7.102	



Selain Jabatan Fungsional Pemeriksa, BPK juga memiliki Jabatan Fungsional lainnya yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional

No.	IKU	Realisasi Tahun 2021					Jumlah
		Terampil	Pertama	Muda	Madya	Utama	
1	JF Pemeriksa	0	2.087	1.848	445	13	4.393
2	JF Widyaiswara	0	4	7	5	2	18
3	JF Arsiparis	0	14	10	9	0	33
4	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN	0	27	38	7	0	72
5	JF Analis Kebijakan Publik	0	5	23	0	0	28
6	JF Analis Anggaran	0	10	9	7	0	26
7	JF Analis Kepegawaian	0	37	35	3	0	75
8	JF Asesor SDM Aparatur	0	12	17	0	0	29
9	JF Dokter Gigi	0	0	0	3	2	5
10	JF Dokter	0	0	0	3	1	4
11	JF Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	0	1	3	0	0	4
12	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0	0	4	0	0	4
13	JF Pranata Hubungan Masyarakat	0	8	14	0	0	22
14	JF Pranata Komputer	0	9	38	3	0	50
15	JF Pranata Komputer Mahir	5	0	0	0	0	5
16	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	1

No.	IKU	Realisasi Tahun 2021					Jumlah
		Terampil	Pertama	Muda	Madya	Utama	
17	JF Pranata Komputer Terampil	2	0	0	0	0	2
18	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	1
19	JF Perawat Gigi Pelaksana	1	0	0	0	0	1
20	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	0	0	0	0	1
21	JF Perawat Penyelia	2	0	0	0	0	2
22	JF Pranata Keuangan APBN Mahir	15	0	0	0	0	15
23	JF Pranata Keuangan APBN Penyelia	3	0	0	0	0	3
24	JF Pranata Keuangan APBN Terampil	14	0	0	0	0	14
Jumlah		45	2.214	2.046	485	17	4.808

Isu Strategis BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

1. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*;
2. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus tuntutan perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
3. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*;
4. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kualitas dan kuantitas SDM (pengelola dan fasilitator) belum mencukupi, kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, *stakeholder* belum sinergis, dan tata kelola belum optimal;
5. BPK belum sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Merit (kualifikasi, kompetensi dan kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM BPK; dan
6. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut mengakibatkan adanya perubahan cara kerja baru organisasi (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, BPK perlu meningkatkan perhatian dan dukungan teknis berupa layanan TI yang memadai maupun dukungan non teknis berupa layanan kesehatan fisik dan mental (psikologis) bagi para pegawainya.

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA



PERENCANAAN STRATEGIS

- FRAMEWORK RENSTRA
- PETA STRATEGI
- RENCANA IMPLEMENTASI STRATEGI (RIR)

PERJANJIAN KINERJA

- INDIKATOR KINERJA UTAMA
- RENCANA KERJA TAHUNAN
- RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN RENCANA KEGIATAN SETJEN DAN PENUNJANG (RKP/RKSP)
- PERJANJIAN KINERJA
- PENGELOLAAN PENGUKURAN KINERJA BERBASIS SIMAK

RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

EVALUASI PERENCANAAN STRATEGIS

- EVALUASI INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
- MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RENSTRA BPK

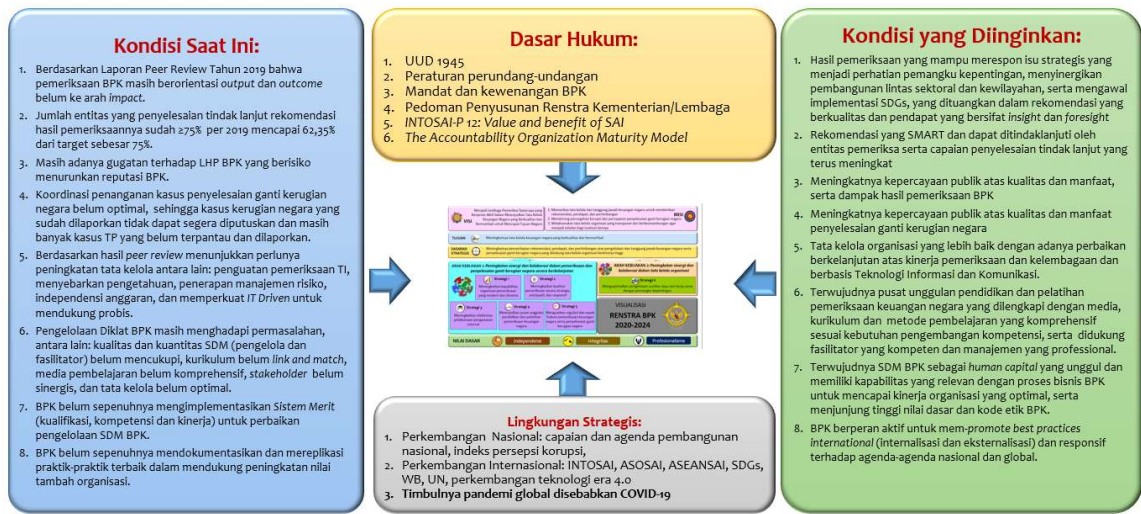
A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengingat periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dibandingkan dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyusunan Renstra BPK 2020–2024 selain menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah, juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual, antara lain Renstra BPK 2020-2024 juga telah merespons dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Alur pikir pengembangan Renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mengenai mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian Renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Bagian Kondisi Saat Ini juga telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020 – 2024



Gambar 6 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024

Dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024, yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. Kondisi BPK yang diinginkan dalam Renstra BPK 2020-2024 dapat diuraikan lebih lanjut menjadi:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
2. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
3. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
4. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
5. tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan, dan berbasis TI dan Komunikasi;
6. terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang profesional;
7. terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK; dan

8. terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

Kerangka Renstra

Renstra BPK 2020-2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pemeriksa Keuangan. Renstra BPK menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan bagi seluruh unit kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk periode Tahun 2020—2024, Renstra BPK ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 November 2020. Dalam Renstra tersebut, BPK menetapkan visi, misi dan strategi, seperti dijabarkan sebagai berikut.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Visi BPK 2020-2024 merupakan kelanjutan dari visi BPK pada Renstra periode sebelumnya yang mengedepankan peranan ke luar organisasi. Melalui visi ini, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan tugas utamanya, baik lingkup nasional maupun internasional. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut.

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari.

NILAI DASAR

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

TUJUAN BPK 2020 - 2024

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS BPK 2020 - 2024

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta, dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mindset*), dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK; (2) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan; dan (3) nilai *quality assurance* reformasi birokrasi.

Peta Strategi

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 7 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN 1

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik di tingkat nasional maupun global.

Ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 1 dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat kepuasan atas integrasi perencanaan; (b) tingkat kematangan manajemen pengetahuan; (c) tingkat kematangan penerapan manajemen risiko; (d) tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan; (e) tingkat pemenuhan pendapat BPK; (f) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas ikhtisar hasil pemeriksaan; (g) tingkat pemenuhan pertimbangan atas SAP atau SPIP; (h) indeks mutu organisasi; (i) tingkat keterterapan perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan; (j) tingkat kualitas pelaporan hasil pemeriksaan BPK.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 2 merupakan strategi BPK dalam bentuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu-isu publik yang strategis. BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs.

Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial, sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam RPJMN 2020–2024. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan

mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas serta berdampak signifikan, sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Pemeriksaan BPK memiliki karakteristik antisipatif dengan memeriksa suatu permasalahan, sebelum permasalahan tersebut menjadi besar. Dengan demikian BPK dapat menjalankan perannya dalam mengantisipasi dampak dari sebuah kebijakan pemerintah, dan memprediksi risiko yang akan timbul di jangka menengah atau jangka panjang. Selain itu, BPK juga harus tanggap dalam merespons isu strategis yang berkembang di lingkungan nasional maupun internasional, serta memperhatikan permintaan pemangku kepentingan dengan tetap mempertahankan independensi BPK.

Pemeriksaan BPK juga bersifat responsif atau lebih tanggap dalam menangkap isu strategis dan permintaan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga pemeriksa yang independen, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Namun, BPK juga dapat melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan lainnya ataupun melakukan pemeriksaan investigasi, perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli berdasarkan permintaan dari Instansi Penegak Hukum (IPH). Untuk ke depannya, BPK akan lebih responsif dalam menangkap isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020–2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Dalam melaksanakan pemeriksaan SDGs, BPK menerapkan panduan dari IDI's SDGs *Audit Model* (ISAM) yang dibuat berdasarkan ISSAI.

Penyelarasan tema untuk pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker di BPK untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 8 - Focal Point BPK 2020-2024

Dari gambar tersebut, penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan RPJMN/RPJMD 2020–2024 akan dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK juga mengantisipasi adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode Renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat, dan mengakomodasinya dengan pemeriksaan signifikan lainnya. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal, dengan mempertimbangkan kecukupan sumber daya dan kapasitas anggaran yang tersedia. Dalam konteks merespons terjadinya pandemi COVID-19, BPK dapat melaksanakan Pemeriksaan Tematik Penanganan Pandemi COVID-19 secara menyeluruh mengenai penanganan pandemi dan tata kelola dalam menghadapi dampaknya, seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional, *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah, serta tata kelola pelaksanaan tugas pemerintahan pascapandemi.

Keberhasilan strategi pemeriksaan ini akan diukur dengan indikator: (a) tingkat implementasi strategi pemeriksaan; (b) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (c) tingkat pemenuhan pemeriksaan atas permintaan para pemangku kepentingan; (d) tingkat pemanfaatan *big data analytics*; (e) tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan; (f) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan; dan (g) tingkat pemanfaatan hasil investigasi.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini merupakan strategi BPK untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satker di BPK. Implementasi strategi ini

diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Keberhasilan BPK dalam melakukan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara diukur dengan indikator: (a) tingkat kematangan SPI; (b) indeks efektivitas pelaksanaan pengawasan internal; (c) tingkat pemenuhan satker yang telah berpredikat WBK/WBBM; (d) tingkat penegakan kode etik dan disiplin; (e) tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal; dan (f) tingkat pemenuhan kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara, yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal, baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pascadiklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik.

BPK akan mengukur keberhasilan dalam mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Untuk itu, indikator yang relevan dengan keberhasilan Strategi 4, yaitu: (a) tingkat pemenuhan peningkatan kinerja satuan kerja; (b) persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya; (c) tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja alumni diklat; (d) persentase lulusan diklat dengan predikat minimal "memuaskan"; (e) indeks kepuasan peserta diklat dan peserta sertifikasi; (f) tingkat pemenuhan implementasi program sertifikasi dan akreditasi; (g) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Badiklat PKN.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Ukuran keberhasilan dalam pencapaian strategi di atas dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK; (b) tingkat pemenuhan penyusunan dan penyempurnaan peraturan BPK; (c) tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK; (d) tingkat penyelesaian kasus kerugian oleh bendahara dan pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; dan (e) tingkat pemenuhan bahan pertimbangan BPK dalam penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.

ARAH KEBIJAKAN 2

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan bentuk perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. BPK juga selalu berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam mengukur keberhasilan strategi pengelolaan sumber daya yang optimal dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, indikator yang digunakan yaitu: (a) tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi; (b) penilaian penerapan sistem merit; (c) opini LK BPK; (d) tingkat kinerja anggaran BPK; (e) penilaian penerapan SPBE; dan (f) indeks kebahagiaan pegawai.

Rencana Implementasi Renstra (RIR)

RIR 2020-2024 merupakan dokumen yang menjembatani implementasi Renstra BPK 2020-2024 dari rencana lima tahunan menjadi rencana tahunan sehingga seluruh satker dapat berkontribusi sesuai dengan lingkup strategi yang telah ditetapkan. Tujuan dibentuknya RIR 2020-2024 adalah untuk memudahkan seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh tujuan dalam Renstra BPK 2020-2024. Adapun manfaat RIR 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. menjadi panduan satker dalam menyusun Renstra satker dalam rangka *cascading* Renstra BPK *Wide*;
2. memberikan informasi kebutuhan sinergi dan dukungan antar satker;
3. menjadi panduan satker dalam menyusun anggaran dan rencana tahunan dengan adanya detail rincian kegiatan yang telah ditentukan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan prioritas strategis;
4. memberikan gambaran bagi satker terkait aktivitas untuk setiap indikator kinerja, agar capaian kinerja dapat terpantau dan terukur dengan baik;

5. memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan; dan
6. memberikan gambaran rincian kegiatan untuk menunjukkan runutan *logical framework* yang digunakan.

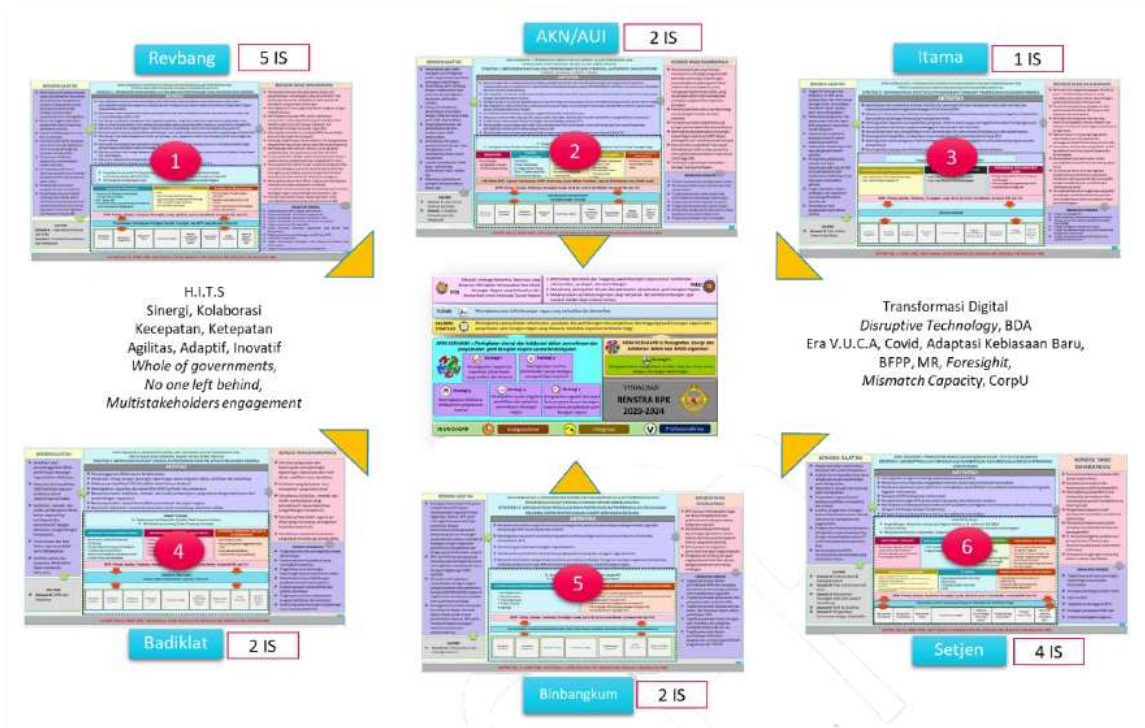
RIR 2020-2024 menjelaskan rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap satker untuk mencapai indikator kinerja dalam rangka dukungan aktivitas masing-masing satker terhadap Sasaran Strategis BPK dalam Renstra BPK 2020-2024. Penjabaran atas sasaran, indikator kinerja, dan aktivitas-aktivitas serta hubungannya satu sama lain dalam mendukung pencapaian tujuan diilustrasikan dalam Matriks Rencana Implementasi Renstra. RIR juga mengidentifikasi kebutuhan sinergi dan dukungan antar satker, serta menjabarkan *cascading* indikator kinerja BPK menjadi indikator kinerja di setiap satker sebagai gambaran utuh kontribusi setiap elemen di BPK dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Renstra BPK 2020-2024.

RIR 2020-2024 juga menjelaskan mengenai pemeriksaan strategis BPK dalam kurun waktu 2020-2024. Hal ini sesuai dengan arah pemeriksaan yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024. Oleh karena itu, RIR 2020-2024 akan mengungkapkan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksaan strategis, yang meliputi pemeriksaan sesuai mandat, pemeriksaan tematik nasional/lokal, pemeriksaan signifikan lainnya, pemeriksaan atas permintaan para pemangku kepentingan, dan pemeriksaan investigatif. Lebih lanjut, RIR 2020-2024 juga mengatur mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi Renstra BPK 2020-2024.

Dokumen RIR 2020-2024 menjabarkan keterkaitan antara sasaran, indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, dan aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian target indikator, baik di tingkat BPK, Eselon I, maupun Eselon II. Hal ini dilakukan untuk memberikan kerangka atas pengelolaan kegiatan yang harus dilakukan di setiap satker. Dokumen RIR 2020-2024 juga akan memuat detail rincian aktivitas baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan prioritas yang dijabarkan menjadi inisiatif strategis.

Pencapaian target kinerja dilaksanakan setiap satker melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis, maupun melalui kegiatan inisiatif yang juga bersifat strategis. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan manfaat tambahan bagi organisasi dan para pemangku kepentingan. Kegiatan rutin strategis merupakan kegiatan yang dilakukan satker sehari-hari berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kegiatan rutin strategis diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi yang terlihat dari capaian IKU BPK *Wide*, sedangkan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker, serta mempengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK *Wide*. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat.

Bentuk sinergi dan kolaborasi antar strategi pada Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 9 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024

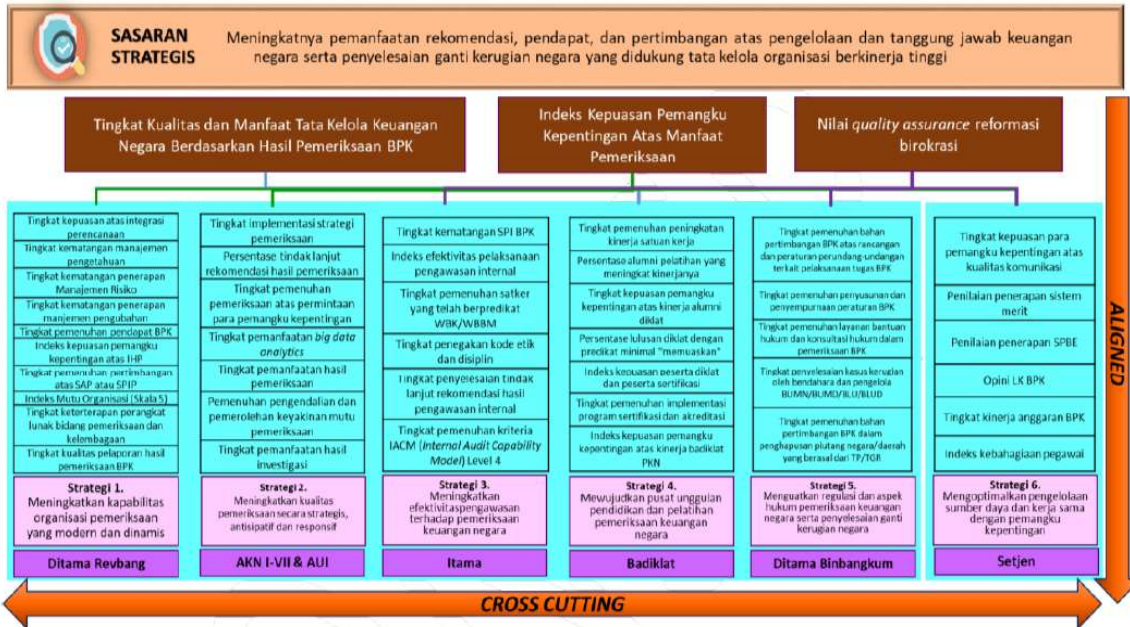
Gambar di atas menunjukkan hubungan dan keterkaitan antar strategi dalam mendukung visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Keberhasilan atas pencapaian visi dan misi tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi. Implementasi strategi juga perlu mengidentifikasi *fast gain* dan *quick win* sebagai bagian dari *milestone* implementasi.

Selain itu, implementasi dari setiap strategi tersebut juga perlu didukung dengan penerapan transformasi digital, perencanaan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial (H.I.T.S), adanya sinergi dan kolaborasi yang memperhatikan kecepatan, ketepatan, agilitas, adaptif, dan inovatif, serta dengan menerapkan prinsip *no one left behind*. Sinergi dan kolaborasi antar strategi tersebut juga perlu disesuaikan untuk dapat menghadapi era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity*) yang penuh ketidakpastian, adanya *disruptive technology*, serta kondisi normal baru sebagai dampak pandemi COVID-19.

Strategi yang diterapkan juga perlu menerapkan *BPK Framework of Professional Pronouncements* (BFPP), manajemen risiko, *big data analytics*, dengan mempertimbangkan adanya *mismatch capacity* antar Satker, serta didukung oleh pengembangan kompetensi pegawai melalui *BPK Corporate University*.

Sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi untuk mencapai sasaran strategis juga ditunjukkan pada pola keterkaitan indikator kinerja antar strategi, baik secara *aligned* maupun *cross-cutting*. *Aligned* berarti adanya keselarasan secara vertikal, yang terlihat dari *cascading* atau penurunan kinerja dari atas ke bawah (*top-down*), yaitu dari level sasaran strategis ke strategi. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang dirumuskan, telah selaras dan sudah sesuai dari level organisasi sampai level satker. Kemudian *cross-cutting*

adalah keselarasan secara horizontal atau lintas sektoral, hal ini terlihat dari adanya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dalam mencapai target kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung dan terkait. Penurunan indikator kinerja yang menghubungkan sasaran strategis dan strategi secara *aligned* dan *cross-cutting* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 10 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi

Seluruh indikator kinerja di Sasaran Strategis pada level BPK *Wide* diturunkan ke indikator kinerja di Strategi yang diampu oleh masing-masing Eselon I. Hal ini untuk menjaga keselarasan antar unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal. *Cascading* ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan melihat hubungan antar masing-masing indikator, serta melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing indikator kinerja dalam mendukung tercapainya indikator kinerja di level yang lebih tinggi. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis didukung oleh pencapaian indikator kinerja program pada setiap strategi yang diampu oleh setiap Eselon I.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama

Renstra BPK mencakup tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPK. Untuk memantau pencapaian tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPK tersebut, telah ditetapkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK, dimana setiap IKU telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra. IKU BPK tersebut ditopang dengan IKU tiap-tiap Strategi yang merupakan tanggung jawab Unit Kerja Eselon I.

Target kinerja dari setiap IKU dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK selaku Badan, Eselon I, serta Eselon II. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan anggaran, IKU, Indikator Kinerja Keluaran (IKK), serta target IKU dan IKK yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit dan Satuan Kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2021, pada tanggal 31 Desember 2020, telah dilakukan penetapan atas PK BPK, 13 PK Eselon I, lima PK Staf Ahli, dan 74 PK satker Eselon II. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound (SMART)*. Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020–2024, BPK menetapkan satu tujuan dan satu sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama, sebagai berikut.

Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	73%*	76%	79%	82%
		2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10 (Sangat Memuaskan)	4,20 (Sangat Memuaskan)	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,40 (Sangat Memuaskan)	4,50 (Sangat Memuaskan)
		3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	81,28** (A)	88,22** (A)	88,27** (A)	88,32** (A)

*) Berdasarkan hasil pertimbangan dari Sidang BPK II pada tanggal 27 Januari 2021, target IKU 1 untuk Tahun 2021 diusulkan untuk tetap sama seperti target IKU 1 Tahun 2020.

**) Pada tahun 2021 terjadi perubahan metode penilaian dari KemenPAN RB, oleh karena itu berdasarkan hasil pertimbangan Sidang BPK II pada tanggal 27 Januari 2021, target IKU 3 untuk Tahun 2021 s.d. 2024 diusulkan untuk diturunkan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK ke dalam program atau kegiatan tahunan. RKT menjadi pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja di BPK dalam menyusun Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) Tahun 2021. Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT juga mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)

BPK menerjemahkan RKT Tahun 2021 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk *monitoring* pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU, program dan anggaran, serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, serta IKU beserta targetnya, yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit dan satuan kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2021, pada tanggal 31 Desember 2020, telah dilakukan penandatanganan atas PK BPK, 13 PK Eselon I, lima PK Staf Ahli, dan 74 PK Eselon II. Berikut adalah IKU dan target IKU BPK Tahun 2021 yang tertuang dalam PK BPK 2021.

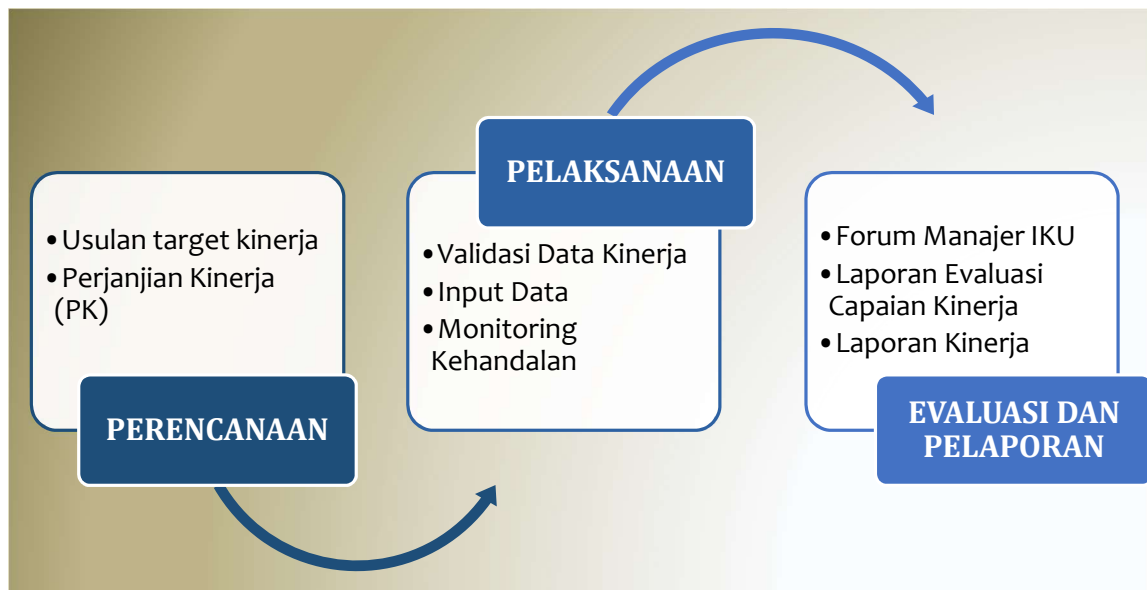


Gambar 11 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2021

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK 2020-2024, BPK menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara *online* serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja, dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA). Implementasi manajemen kinerja tersebut dilakukan berdasarkan POS Pengelolaan Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011.

Pengelolaan SIMAK dapat digambarkan sebagai suatu siklus tahunan yang dikelompokkan menjadi tiga tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan pelaporan, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 12 - Siklus Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU/IK diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan, dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi, dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan oleh Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi.

C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi

Dinamika organisasi memerlukan adanya penyesuaian organisasi baik terhadap perubahan internal maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini, BPK menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang akan berdampak dalam pencapaian sasaran organisasi. Penerapan Manajemen Risiko di BPK merupakan salah satu bentuk dukungan dalam implementasi Renstra BPK 2020-2024 untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran organisasi BPK. Penerapan Manajemen Risiko di BPK dilakukan dengan memperhatikan konteks (lingkungan), lingkup, dan kriteria risiko. Konteks disini meliputi konteks internal dan eksternal. Konteks internal antara lain meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pimpinan dan proses bisnis. Konteks eksternal antara lain meliputi pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, isu-isu strategis, dan risiko baru (*emerging risks*). Perubahan dari kedua konteks tersebut dimungkinkan mendorong terjadinya peristiwa risiko yang berpengaruh dalam pencapaian sasaran strategis/strategi BPK.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, pimpinan BPK berkomitmen menciptakan dan melindungi nilai organisasi BPK dengan memastikan BPK memiliki kapabilitas untuk menangani risiko. Sebagai bentuk komitmen penerapan manajemen risiko, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Untuk penerapannya, BPK telah menandatangani Piagam Manajemen Risiko Tahun 2021 yang merupakan tahun keempat penerapan manajemen risiko di BPK. Dokumen ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan profil risiko BPK yang ditampilkan dalam bentuk *dashboard* risiko dan disertai dengan rencana penanganan risiko. Berdasarkan dokumen tersebut, BPK telah mengidentifikasi risiko-risiko berdasarkan aktivitas (proses bisnis) di BPK, baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategi, IKU, dan target dan rencana penanganannya. Rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dipantau pelaksanaannya pada setiap akhir semester. Laporan pemantauan terhadap penanganan risiko akan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko BPK Tahun 2021. Uraian lebih lanjut atas risiko dan rencana penanganannya akan dijelaskan di sasaran strategis pada bab selanjutnya.

D. Evaluasi Perencanaan Strategis

Evaluasi Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 297/K/X-XIII.2/7/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis BPK, salah satu bagian dari siklus penyusunan Rencana Strategis BPK adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah upaya untuk mendapatkan informasi keberhasilan atau kegagalan dan capaian strategi. Aktivitas utama dalam evaluasi strategi yaitu mereviu faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dari strategi saat ini, mengukur kinerja, dan mengambil langkah-langkah koreksi. Salah satu dari langkah koreksi yang dilakukan oleh BPK selama periode Renstra BPK 2020—2024 adalah evaluasi atas indikator dan target kinerja.

1. Evaluasi atas Indikator Kinerja

Secara spesifik, evaluasi atas indikator kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 514/K/X-XIII.2/12/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja BPK. Evaluasi atas indikator kinerja BPK dilakukan secara periodik untuk memastikan agar indikator-indikator kinerja yang ada dapat mengukur pencapaian strategi secara spesifik, relevan, akurat, dan representatif. Oleh karena Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra BPK 2020-2024, indikator kinerja yang disajikan pada Bab III adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024.

2. Evaluasi atas Target Kinerja

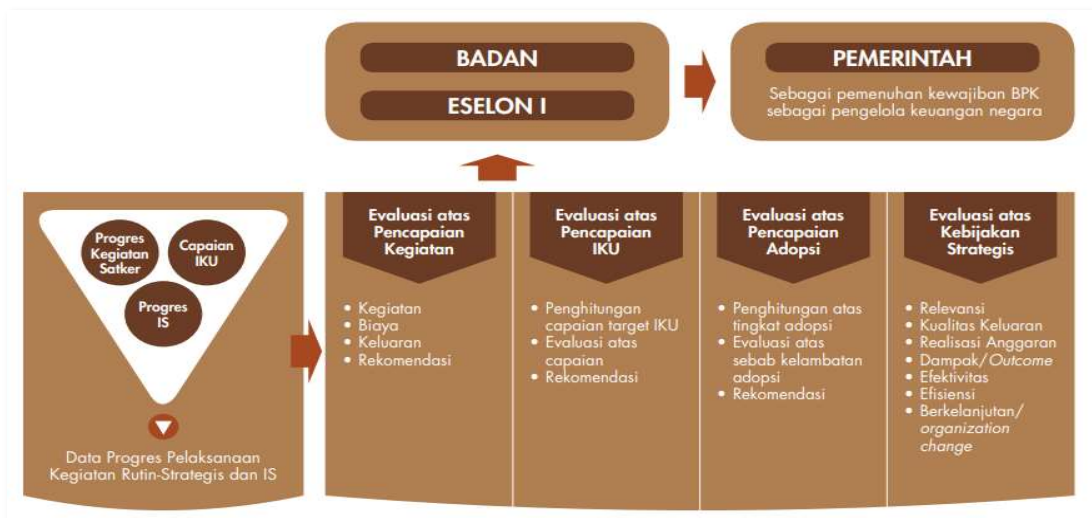
Secara spesifik, evaluasi atas target kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 124/K/X-XIII.2/3/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK. Evaluasi atas target kinerja dilakukan setiap tahun untuk memastikan agar target kinerja tahunan yang ditetapkan mampu menjembatani secara rasional antara kapasitas organisasi saat ini dan tuntutan dari para pemangku kepentingan. Untuk keperluan penyajian laporan, target kinerja yang disajikan pada Bab III merupakan target kinerja yang direncanakan pada Periode Renstra BPK 2020–2024.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK

Atas pelaksanaan kegiatan dalam implementasi Renstra, dilakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat organisasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian implementasi Renstra BPK adalah:

- mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian IKU, kegiatan, adopsi keluaran (*output*) oleh pegawai, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul, guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode pembangunan berikutnya;
- hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *baseline* data dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan Renstra dan RIR; dan
- mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Data perkembangan pelaksanaan Renstra diolah dari sistem aplikasi yang memantau progres pelaksanaan kegiatan inisiatif satuan kerja, laporan bulanan satuan kerja, serta capaian atas indikator utama. Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 13 – Monitoring dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kelembagaan dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu bulanan di tingkat satker Eselon II dan Eselon I, triwulanan, semesteran, dan tahunan di tingkat BPK. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker dan pengelola IS, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat, serta hasil reviu Itama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada *progress* ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran, dan capaian keluaran. Evaluasi juga dilakukan atas capaian IKU, evaluasi atas tingkat adopsi oleh para pegawai, serta evaluasi atas kebijakan strategis untuk memastikan adanya relevansi antara kegiatan dengan Renstra, kualitas keluaran yang dihasilkan, dampak atau manfaat yang dapat direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memastikan adanya keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan sesuai agenda Renstra.

Pembahasan atas hasil evaluasi ini dilakukan melalui berbagai forum rapat antara lain rapat teknis, Forum Eselon I, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK, Rapat Kerja Pelaksana BPK, dan Rapat Koordinasi Teknis di tingkat satuan kerja Eselon I. Evaluasi yang telah dijelaskan tersebut adalah untuk evaluasi atas pelaksanaan Renstra. Selain itu, setiap tahun BPK akan melakukan reviu dan evaluasi atas substansi Renstra untuk memastikan relevansi Renstra BPK dengan kondisi yang terjadi di internal dan eksternal organisasi. Hasil reviu atas Renstra akan dapat mengubah rumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi atau rumusan atas indikator kinerja utama, dan targetnya.



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- SASARAN STRATEGIS
- IKU 1
- IKU 2
- IKU 3
- STRATEGI 1
- STRATEGI 2
- STRATEGI 3
- STRATEGI 4
- STRATEGI 5
- STRATEGI 6
- INDIKATOR KINERJA GENERIK

REALISASI DAN DUKUNGAN PROGRAM PENGANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA SERTA ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA




TANTANGAN MASA DEPAN

AKUNTABILITAS KINERJA

BPK telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan kinerja BPK adalah Aplikasi Prisma. Siklus pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam Aplikasi Prisma mencakup proses penginputan, validasi, dan reviu data. Output dari Aplikasi Prisma digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BPK serta untuk menyusun laporan kinerja BPK. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola kinerja Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan pelaksana kinerja di setiap Satuan Kerja.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di-*input* oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA.
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
 - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.
 - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target.
 - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

<i>Color Range</i>	Deskripsi
	SKOR \geq 100
	$80 \geq$ SKOR $<$ 100
	SKOR $<$ 80

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Renstra BPK 2020–2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi BPK. Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dan Strategi BPK yang dijabarkan dalam Renstra tersebut, maka dibangun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK. Berikut ini akan diuraikan pencapaian Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra BPK 2020-2024.

Sasaran Strategis – Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi

Pencapaian Sasaran Strategis dinilai melalui tiga IKU yaitu: (1) Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan; dan (3) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi. Perincian skor kinerja BPK dan capaian masing-masing IKU disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2021 dan 2020

Sasaran Strategis/Indikator	2021				2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja	Realisasi	Skor	
Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi							
IKU/Sub IKU							
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	74,19%	101,63%	102,47	69,93%	98,68
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (<i>Bobot 70%</i>)		70,18%			67,93%	
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (<i>Bobot 15%</i>)		85,30%			-	
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (<i>Bobot 15%</i>)		81,79%*)			79,28%	
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,20 (Sangat Memuaskan)	4,25 (Sangat Memuaskan)	101,19%		4,18 (Sangat Memuaskan)	
3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	81,28 (A)	88,17* (A)	108,48%		88,17 (A)	

* sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021, penilaian atas Nilai *Q4RB* belum terbit, sehingga menggunakan realisasi Tahun 2020.

Hasil perhitungan skor kinerja BPK Tahun 2021 menunjukkan bahwa skor kinerja BPK Tahun 2021 adalah sebesar 102,47 atau meningkat sebesar 3,79 point apabila dibandingkan skor kinerja BPK Tahun 2020 yang mencapai 98,68. Peningkatan skor kinerja tersebut terutama didorong oleh berhasilnya pengukuran Sub IKU 1.2 - Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK dengan realisasi tahun 2021 sebesar 85,30% dan peningkatan realisasi Sub IKU 1.3 - Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara dari 79,28 pada tahun 2020 menjadi sebesar 81,79% pada tahun 2021.

Capaian Sasaran Strategis dan skor kinerja tersebut mengindikasikan bahwa BPK telah berhasil mendorong entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga para pemangku kepentingan sangat puas dengan kinerja BPK. Skor kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa BPK telah berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan dan jumlah kasus yang dapat diselesaikan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis Renstra BPK 2020-2024 antara lain optimalisasi penerapan SPKN, PMP, PMPP, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. BPK juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP, mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TLRHP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian TLRHP yang dilakukan oleh pemerintah/entitas, melaksanakan reviu berkelanjutan atas implementasi strategi pemeriksaan agar selaras dengan program pemerintah, dan mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TP/TGR dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. BPK juga mengembangkan Aplikasi SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah) untuk memudahkan pemantauan Kerugian Negara/Daerah. Upaya-upaya BPK yang terintegrasi tersebut juga disertai dengan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Untuk memastikan agar Sasaran Strategis tercapai, BPK telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis. Beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis ini antara lain:

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Berlarut-larut

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini di antaranya:

- a. belum tersedianya pengaturan lebih lanjut atas pemberian sanksi pada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi; dan

- b. pengklasifikasian status tindak lanjut belum mengakomodasi *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

2. Entitas Tidak Dapat Memenuhi Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Berdasarkan hasil identifikasi awal, penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini adalah terjadinya wabah penyakit/pandemi (misalnya COVID, flu burung, penyakit menular lainnya).

3. Pendapat Tidak Relevan dengan Perkembangan Program Pemerintah

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini di antaranya:

- a. hasil pemeriksaan tidak selaras dengan perkembangan isu terkini;
- b. obyek pemeriksaan tidak selaras dengan perkembangan isu terkini;
- c. strategi pemeriksaan belum selaras dengan perkembangan program pemerintah; dan
- d. mekanisme penyusunan pendapat belum sistematis.

4. Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Berlarut-larut

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini di antaranya:

- a. belum ada mekanisme penyelesaian TP/TGR di satker pemeriksaan;
- b. belum ada keseragaman perlakuan atas penanganan kasus kerugian yang dilakukan oleh bendahara yang ditemukan pada saat pemeriksaan;
- c. belum ada peraturan terkait proses penyelesaian kasus TGR pada BUMN/BUMD;
- d. belum ada juklak juknis atas PP 53 pada pemerintah daerah (eksternal); dan
- e. terjadinya wabah penyakit/pandemi (misalnya COVID, flu burung, penyakit menular lainnya).

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, BPK melaksanakan serangkaian rencana penanganan risiko serta berbagai kegiatan yang bersifat rutin maupun strategis. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021, antara lain optimalisasi penerapan SPKN, PMP, PMPP, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Kegiatan selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif antara BPK dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP dan mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TLRHP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. BPK juga melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian TLRHP yang dilakukan oleh pemerintah/entitas dan melaksanakan reuiu berkelanjutan atas implementasi strategi pemeriksaan agar selaras dengan program pemerintah. Kegiatan lainnya dengan melaksanakan pengembangan Aplikasi SIKAD yang terintegrasi, dan mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TP/TGR dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencapaian SS dinilai melalui tiga IKU yaitu: (1) Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan; dan (3) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi. Pencapaian SS Tahun 2021 adalah 101,54. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

- *IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$, tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK, dan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara.*
- *IKU ini menunjukkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara.*

IKU 1 tentang Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan indikator kinerja yang pengukurannya baru dilakukan pada Tahun 2020 dalam Periode Renstra 2020–2024. IKU ini mengukur manfaat hasil pekerjaan BPK (dalam bentuk pemeriksaan, pendapat, pertimbangan, dan tuntutan ganti kerugian negara/daerah) terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara. Hasil pekerjaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan putusan tuntutan ganti kerugian negara

diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Agar rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan putusan tuntutan ganti kerugian negara segera diimplementasikan oleh entitas pemeriksaan, maka perlu upaya aktif dari BPK dalam bentuk peningkatan kualitas hasil pekerjaan BPK dan upaya-upaya persuasif lainnya seperti monitoring implementasi tindak lanjut dan forum dialog antara BPK dan entitas pemeriksaan. Forum dialog tersebut berguna untuk meningkatkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap hasil pekerjaan BPK. Oleh karena hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi BPK ditindaklanjuti maka perlu diukur tingkat penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Adapun secara rinci, capaian IKU 1 dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1 Periode Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	73%	73%	76%	79%	82%
Realisasi	NA*	69,93%	74,19%	-	-	-
Capaian	NA*	95,80%	101,63%	-	-	-
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	+4,26	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	NA*	85,28%	90,48%	-	-	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024 sehingga belum ada pada tahun 2019

Realisasi IKU 1 pada tahun 2021 adalah sebesar 74,19% atau mencapai 101,63% dari target yang ditetapkan sebesar 73%. Capaian IKU 1 ini meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 69,93%.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 5 - Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	73%	76%	79%	82%	74,19%	90,48%

Perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi IKU 1 telah mencapai 90,48%. Diharapkan capaian IKU 1 dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang sehingga target yang ditetapkan dalam Renstra BPK akan tercapai pada Tahun 2024.

Realisasi IKU 1 tersebut diperoleh dari hasil pengukuran atas tiga sub indikator berikut ini.

1. Sub IKU 1.1 - Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$ dengan realisasi tahun 2021 sebesar 70,18%.
2. Sub IKU 1.2 - Tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK dengan realisasi tahun 2021 sebesar 85,30%.
3. Sub IKU 1.3 - Tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,79%.

Uraian capaian masing-masing Sub IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1.1 Sub IKU 1.1 - Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$

Sub IKU 1.1 menunjukkan tingkat kepatuhan entitas (baik itu kementerian/lembaga/pemda) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai 75% atau lebih dibagi dengan total entitas yang diperiksa. Rekomendasi pemeriksaan yang dimasukkan dalam perhitungan Sub IKU 1.1 adalah rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2005 sampai dengan sekarang. Pada Tahun 2021, realisasi persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$ adalah sebesar 70,18% atau meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai 67,93%. BPK terus berupaya untuk lebih meningkatkan pencapaian indikator ini dengan mendorong entitas untuk lebih giat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

1.2 Sub IKU 1.2 - Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK

Sub IKU 1.2 merupakan cerminan atas pelaksanaan wewenang BPK dalam bentuk pemberian pendapat dan/atau pertimbangan BPK. Pendapat BPK disusun dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil kajian terhadap isu strategis yang memerlukan pendapat BPK sedangkan pertimbangan BPK diberikan atas:

- Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- Penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Sub IKU 1.2 diukur dengan menggunakan survei atas pemanfaatan pendapat/pertimbangan BPK dengan responden terdiri atas entitas yang terkait langsung dengan pendapat/pertimbangan BPK. Sub IKU 1.2 baru pertama kali diukur pada tahun 2021, dan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan diketahui bahwa realisasi tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK tahun 2021 adalah sebesar 85,30%.

1.3 Sub IKU 1.3 - Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Sub IKU 1.3 menunjukkan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud di sini terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum (baik yang disengaja maupun kelalaian) yang dilakukan oleh bendahara, non bendahara, dan pejabat lainnya. Kerugian negara/daerah tersebut dapat berasal dari hasil pemeriksaan BPK maupun hasil laporan entitas dimana kasus kerugian negara/daerah tersebut terjadi. Realisasi IKU 1.3 diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berhasil diselesaikan terhadap total jumlah kasus keseluruhan TP dan TGR.

Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan baik jumlah kasus maupun jumlah penyelesaian kasus TP dan TGR. Realisasi IKU 1.3 pada tahun 2021 adalah sebesar 81,79% atau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai 79,95%. Jumlah kasus TP dan TGR yang selesai pada tahun 2021 adalah sebanyak 72.591 kasus dari total kasus sebanyak 88.755 kasus sedangkan jumlah kasus TP dan TGR yang selesai pada tahun 2020 adalah sebanyak 63.839 dari total kasus sebanyak 79.851 kasus. Data tingkat penyelesaian tuntutan TP dan TGR tersebut dihitung berdasarkan jumlah kasus TP dan TGR yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021.

Selain berupaya mencapai Sasaran Strategis Renstra 2020-2024, BPK juga berupaya agar pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan dengan efisien. Beberapa **upaya efisiensi** yang dilakukan BPK dalam mencapai Sasaran Strategis yang terkait IKU 1 antara lain melalui penyempurnaan berkelanjutan mekanisme pengukuran indikator dan proses bisnis dengan mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). Manfaat yang diperoleh atas pengembangan SIPTL dan SIKAD tersebut antara lain berupa penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan

belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu dalam proses monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.

IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan

Pengukuran IKU 2 tentang Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan oleh PT Wahana Data Utama melalui survei tahunan. Melalui survei, responden diminta untuk menyatakan persepsi mereka terhadap tingkat kemampuan hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan aspek kesesuaian rekomendasi dengan temuan dan aspek

implementatif rekomendasi. Responden survei adalah para pemangku kepentingan sebanyak 637 *Auditee*, yaitu pejabat/pihak manajemen yang berasal dari: (1) entitas yang diperiksa, yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dan BUMN/BUMD; (2) Lembaga Perwakilan yang berasal dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten; dan (3) Instansi Penegak Hukum (IPH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK.

- *IKU ini bertujuan memastikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan BPK telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.*
- *IKU ini menggambarkan atau mencerminkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.*

Hasil pemeriksaan BPK yang akan menjadi variabel dalam pengukuran dengan survei ini adalah produk BPK seperti IHPS, LHP, dan produk BPK lainnya. Survei dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran 1-5, sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 : sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 : tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 : memuaskan
- 4,00 – 5,00 : sangat memuaskan

Adapun secara rinci, capaian dan perkembangan capaian IKU 2 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 2 Periode Tahun 2019-2021

IKU 2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,45
Realisasi	4,12	4,18	4,25	-	-	-
Capaian	103,00%	101,95%	101,19%	-	-	-

IKU 2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perubahan Realisasi (Δ)	-0,05	+0,06	+0,07	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	-	92,13%	94,44%	-	-	-

Berdasarkan hasil survei, realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan pada tahun 2021 adalah sebesar 4,25 (sangat memuaskan) atau mencapai 101,19% dari target yang ditetapkan sebesar 4,20 (skala 1-5). Capaian IKU 2 ini meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 4,18 (sangat memuaskan).

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 - Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,25	94,44%

Apabila dibandingkan target akhir Renstra pada tahun 2024, realisasi IKU 2 pada tahun ini baru tercapai 94,44%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai setiap tahun hingga Tahun 2024.

Ketercapaian IKU 2 mengindikasikan BPK telah proaktif dalam merespons isu-isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU 2 antara lain adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pemeriksaan melalui percepatan penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa).
2. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar.

Selain berupaya mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi” BPK juga berupaya melakukan efisiensi dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut. Upaya efisiensi yang dilakukan BPK adalah dengan menggunakan metodologi survei elektronik sehingga dapat menekan biaya perjalanan dinas, menjangkau responden yang lebih luas, dan hasil survey dapat diperoleh lebih cepat. BPK juga mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK.

IKU 3 – Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi

- *IKU ini menunjukkan tingkat capaian BPK dalam implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menpan No. 26 Tahun 2020*
- *Penilaian QA RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun.*

*Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (RB) adalah aktivitas revidasi pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Kegiatan *quality assurance* tersebut bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan QA RB dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun dengan melakukan survei*

terhadap responden yang berasal dari internal BPK. Sesuai dengan Peraturan Menpan No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kategori nilai QA RB Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Sangat Baik (>80-90)
- BB = Baik (>70-80)
- B = Cukup Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Buruk (>30-50)
- D = Sangat Buruk (0-30)

Pada Tahun 2021 BPK menargetkan akan memperoleh nilai QA RB sebesar 81,28 dengan kategori A (Sangat Baik). Sampai dengan laporan ini ditandatangani, QA RB tahun 2021 masih belum diperoleh sehingga dalam pengukuran IKU 3 tahun 2021 masih menggunakan realisasi IKU Tahun 2020. Adapun perkembangan capaian IKU 3 dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 3 Periode 2019-2021

IKU 3 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	AA	A (88,42)	A (81,28)	A (88,22)	A (88,27)	A (88,32)
Realisasi	A	A (88,17)	A* (88,17)	-	-	-
Capaian	96,78%	99,72%	108,48%*	-	-	-
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-	-	-	-

IKU 3 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024		99,83%	99,83%	-	-	-

* sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021, penilaian atas Nilai *QA* RB belum terbit, sehingga menggunakan realisasi Tahun 2020

Oleh karena hasil revidi *QA* RB Tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB belum diterima BPK dan juga dengan pertimbangan bahwa tidak ada masalah signifikan yang diperkirakan dapat menurunkan nilai akuntabilitas kinerja BPK Tahun 2021, maka dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini, BPK menggunakan hasil penilaian periode Tahun 2020, yaitu nilai *QA* RB sebesar 88,17 dengan kategori A "Sangat Baik" atau telah memenuhi target tahun 2021 sebesar 81,28.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	81,28 (A)	88,22 (A)	88,27 (A)	88,32 (A)	88,17* (A)	99,83%*

* sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021, penilaian atas Nilai *QA* RB belum terbit, sehingga menggunakan realisasi Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan target *QA* RB Tahun 2024 pada Renstra 2020-2024, maka pencapaian tersebut adalah sebesar 99,83% dari proyeksi target Tahun 2024.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa revisi target *QA* RB Tahun 2021 yang dilakukan pada awal tahun 2021 (mengantisipasi perubahan metode penilaian oleh KemenPAN RB) menghasilkan target *QA* RB Tahun 2021-2024 yang terlalu rendah. Oleh karena itu, target *QA* RB Tahun 2022 sampai dengan 2024 direvisi kembali dan dinaikan menjadi 88,22 (target tahun 2022), 88,27 (target tahun 2023), dan 88,32 (target tahun 2024).

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi" yang salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan Nilai *QA* RB, maka BPK telah melakukan **upaya efisiensi** berupa penyederhanaan jabatan (efisiensi struktur), BPK PMEF (*Performance Measurement and Evaluation Framework*) untuk efisiensi pengelolaan teknologi informasi dan pemeriksaan strategis sebagai bagian efisiensi proses bisnis.

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 - Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global. Strategi ini diampu oleh Ditama Revbang.

Selama Tahun 2021, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka perencanaan strategis, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan Renstra Satker Tahun 2020-2024, penerapan manajemen pengetahuan, diskusi tentang pengukuran kinerja SAI dengan ANAO (*Australian National Audit Office*), penyusunan konsep *Strategic Foresight* "BPK Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh".

Pada Tahun 2021, skor kinerja Strategi 1 sebesar **96,03**. Capaian Kinerja strategi ini diukur atas enam belas indikator kinerja yang telah ditetapkan terdiri dari 10 IKU dan 6 Indikator Kinerja Generik.

Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun Renstra 2020-2024 yang menunjukkan tingkat kontribusi Ditama Revbang dalam mengintegrasikan dalam satu kesatuan utuh antara perencanaan strategis, operasional dan pengelolaan kinerja, serta mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan (manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan) atas proses perencanaan terintegrasi tersebut. Hal ini diperlukan guna menjamin ketepatan penurunan dan penyelarasan strategi BPK hingga ke level individu. Capaian IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan pegawai BPK yang pernah berhubungan dengan Ditama Revbang dalam hal penyusunan Renstra BPK yang merupakan integrasi perencanaan setiap Satker. Perhitungan tingkat kepuasan menggunakan skala indeks kepuasan, dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	Memuaskan (3,70)	Memuaskan (3,80)
Realisasi	NA*	Sangat Memuaskan (4,14)	Sangat Memuaskan (4,09)
Capaian	NA*	111,89%.	107,63%.
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan pada Tahun 2021 berada pada kategori Sangat Memuaskan dengan skor 4,09 dan di atas target yang ditetapkan pada kategori Memuaskan dengan skor 3,80, sehingga capaiannya sebesar 107,63%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan integrasi perencanaan setiap satker dalam penyusunan Renstra BPK melalui Ditama Revbang sudah dilaksanakan dengan baik.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pengembangan Aplikasi PRISMA sebagai sistem informasi yang terintegrasi dalam proses implementasi Renstra. Hal ini akan menjadi perhatian Ditama Revbang untuk terus melakukan pengembangan pada Aplikasi PRISMA agar lebih terintegrasi dan *user friendly* dalam rangka mendukung dan melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas implementasi Renstra yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil survey, terdapat masukan responden terkait pengembangan Aplikasi PRISMA sebagai sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka mendukung dan melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas implementasi Renstra yang efektif dan efisien. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2021—2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Memuaskan (3,70)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (4,00)	Sangat Memuaskan (4,09)	102,25%

Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan pada Tahun 2021 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

2. Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun Renstra 2020-2024 yang bertujuan untuk menilai kondisi kematangan penerapan manajemen pengetahuan di BPK yang diukur melalui 4 dimensi: *strategy, people, process dan Content and Information Technology*. Pengukuran Kematangan Manajemen pengetahuan dibutuhkan untuk memetakan terpenuhi atau tidaknya komponen manajemen pengetahuan di satuan kerja maupun BPK *wide* pada masing masing dimensi tersebut. Hasil pemetaan yang didapatkan dari pengukuran tersebut, menjadi dasar bagi penyusunan strategi implementasi manajemen pengetahuan di tahun berikutnya baik secara prioritas maupun pelaksanaannya. Indikator ini diukur dengan menilai tingkat kematangan manajemen pengetahuan melalui *self assesment*. Capaian Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan tersebut diukur berdasarkan melalui *self assesment* dalam lima level, yaitu *Initiate* (level 1), *Develop* (level 2), *Standardize* (level 3), *Optimize* (level 4), *Innovate* (level 5).

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 2 Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	<i>Standardize</i> (level 3)	<i>Optimize</i> (level 4)
Realisasi	NA*	<i>Standardize</i> (level 3)	<i>Initiate</i> (1,34)
Capaian	NA*	100%.	33,50%.
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-1,66

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2021 berada pada kategori *Initiate* (1,34) di bawah target yang ditetapkan yaitu kategori *Optimize* (level 4), sehingga capaiannya sebesar 33,50%. Ke depannya Ditama Revbang akan menyusun strategi berdasarkan *baseline* yang diperoleh dari hasil *assessment* untuk meningkatkan pemenuhan atas kematangan manajemen pengetahuan BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan instrumen pengukuran yang digunakan. Pengukuran Kematangan Manajemen Pengetahuan BPK Tahun 2021 menggunakan instrumen yang diadopsi dari instrumen APQC (*American Productivity & Quality Center*) . Instrumen AQPC telah digunakan secara luas oleh berbagai organisasi di dunia karena cukup komprehensif meliputi penilaian atas *objectives, business case, budget, resources, governance & leadership, change management, communication, knowledge process flow, knowledge management approach, content management processes, dan IT process and tools*. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	Standardize (Level 3) [3,0]	Optimize (Level 4) [4,0]	Optimize (Level 4) [4,0]	Optimize (Level 4) [4,0]	Innovate (Level 5) [5,0]	1,34	26,8%

Tabel 13 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 26,8%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya sampai dengan Tahun 2024.

3. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun Renstra 2020-2024 yang menunjukkan pengukuran tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari proses *monitoring and control*. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui posisi organisasi, apakah proses yang dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan. Indikator ini diukur dengan *self assesment*. Capaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko diukur berdasarkan *self assesment* dalam lima level, yaitu *adhoc* (level 1), *preliminary* (level 2), *defined* (level 3), *integrated* (level 4), *optimized* (level 5).

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 3 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	Defined (Level3)	Defined (Level3)
Realisasi	NA*	2,95	2,95
Capaian	NA*	98,33%.	98,33%.
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun 2021 tidak terdapat pengukuran atas kematangan penerapan manajemen risiko oleh Itama. Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebesar 2,95, di bawah target yang ditetapkan sebesar *Defined* (Level 3), sehingga capaiannya sebesar 98,33%. Selanjutnya, Ditama Revbang akan melakukan evaluasi target atas IKU ini pada tahun 2022 menjadi 2 tahun sekali agar lebih *achievable*.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Defined (Level 3) [3,0]	Defined (Level 3) [3,0]	Defined (Level 3) [3,0]	Integrated (Level 4) [4,0]	Optimized (Level 5) [5,0]	2,95	59%

Tabel 15 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 59%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

4. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Indikator ini merupakan IKU baru di Renstra 2020-2024 dan mengukur suatu pengelolaan perubahan yang terstruktur dan sistematis atas Implementasi Inisiatif Strategi Renstra BPK 2020-2024 dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh individu maupun organisasi. Indikator ini diukur melalui survei/*self assessment* dalam lima level yaitu *adhoc/absent* (level 1), *isolated projects* (level 2), *multiple projects* (level 3), *organizational standards* (level 4), *organizational competency* (level 5).

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 4 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	NA*	Multiple Projects (Level 3)
Realisasi	NA*	NA*	<i>Organizational Standards</i> (Level 4)
Capaian	NA*	NA*	133,33%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan berada pada kategori *Organizational Standards* (Level 4) di atas target yang ditetapkan yaitu kategori *Multiple Projects* (Level 3). Nilai ini mengindikasikan bahwa BPK telah memiliki pendekatan umum dan menerapkan standar untuk menggunakan manajemen perubahan pada setiap proyek atau perubahan baru.

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan baru dapat terealisasi pada tahun 2021 ini setelah ditetapkannya inisiatif strategis sebagai bahan dari implementasi Renstra 2020-2024 pada Tahun 2020. Atas capaian baik ini, selanjutnya Ditama Revbang akan melakukan upaya meliputi: pemutakhiran pedoman manajemen perubahan sesuai

kebutuhan perubahan renstra dan standarisasi metodologi pengelolaan kebutuhan di BPK, pembentukan tim pengelola perubahan di level BPK Wide, pengintegrasian manajemen perubahan dengan program reformasi birokrasi, mengomunikasikan perubahan secara berkelanjutan serta mendorong *sponsorship* pimpinan untuk membangun kolaborasi dan keterlibatan seluruh satker dalam mendorong perubahan. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Multiple projects (Level 3)	Multiple projects (Level 3)	Multiple projects (Level 3)	Organizational standards (Level 4)	Organizational competency level (Level 5)	Organizational standards (Level 4)	80%

Tabel 17 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 80%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya sampai dengan Tahun 2024.

5. Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun Renstra 2020-2024 yang menunjukkan kemampuan Ditama Revbang dalam menyiapkan konsep pendapat yang dapat digunakan oleh Badan. Capaian tersebut diukur berdasarkan persentase dari jumlah pendapat yang disampaikan dan disetujui Badan dibandingkan dengan jumlah pendapat yang direncanakan. Formula tersebut berbeda dengan metode penilaian pada periode Renstra sebelumnya yang menggunakan jumlah bahan pendapat yang diterbitkan sehingga nilai yang dicapai pada tahun Renstra 2020-2024 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai realisasi tahun 2019 dan sebelumnya.

Pada Tahun 2021, dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak satu Konsep Pendapat BPK, Ditama Revbang menghasilkan dua Konsep Pendapat BPK yakni tentang:

- a. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat dan (BPK telah menyampaikan pendapat tersebut kepada pemerintah melalui Surat Ketua BPK No. 04/S/I/1/2021 tanggal 18 Januari 2021).
- b. *Strategic Foresight* "BPK Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" (BPK telah menyampaikan pendapat tersebut kepada pemerintah melalui Surat Ketua BPK No. 139/S/I/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021)..

Dengan demikian, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK pada Tahun 2021 adalah sebesar 200% di atas target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 200%. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini Ditama Revbang akan

berupaya untuk selalu tangkas terhadap dinamika perubahan dalam rangka merumuskan tema strategis dalam menyusun bahan pendapat BPK.

Realisasi IKU ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh peran aktif Ditama Revbang dalam penyusunan konsep bahan pendapat yang berkualitas serta dapat memberikan nilai dan manfaat secara optimal kepada pemerintah dan *stakeholder*. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	7	100%	100%
Realisasi	2	100%	200%
Capaian	28,57%	100%	200%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	NA*	+100%

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%

Tabel 19 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP

Indikator ini menunjukkan kualitas dan ketermanfaatan IHP berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan skala indeks kepuasan sebagai berikut:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 6 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,09)	Sangat Memuaskan (4,15)	Sangat Memuaskan (4,38)
Capaian	99,76%	101,22%	104,29%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+0,06	+0,23

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP pada tahun 2021 adalah 4,38 (Sangat Memuaskan) dan di atas target pada nilai 4,20 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya sebesar 104,29%. Capaian ini mengindikasikan bahwa IHP yang diterbitkan oleh BPK telah dinilai memuaskan dalam mendukung tugas lembaga perwakilan dalam melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara/daerah. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini Ditama Revbang akan berupaya untuk selalu tangkas terhadap dinamika perubahan dalam rangka merumuskan tema strategis dalam menyusun bahan pendapat BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Ditama Revbang dalam menghasilkan IHP yang sistematis, singkat, jelas dan mudah dipahami. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Sangat memuaskan (4,1)	Sangat memuaskan (4,2)	Sangat memuaskan (4,2)	Sangat memuaskan (4,3)	Sangat memuaskan (4,3)	Sangat memuaskan (4,38)	101,86%

Tabel 21 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan telah melebihi target tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

7. Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran tingkat pemenuhan terhadap permintaan pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan atau Rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Daerah. Capaian Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP diukur dengan menghitung jumlah pertimbangan SAP

dan SPIP yang dipenuhi, dibandingkan dengan jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang diminta/direncanakan.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 7 Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% dan sesuai dengan target yaitu 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Ditama Revbang telah menyampaikan kepada Badan konsep pertimbangan berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1074/MK.05/2020 tanggal 23 November 2020 tentang permohonan Pertimbangan Revisi Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengenai Perjanjian Konsesi Jasa (PKJ) dan Properti Investasi (PI). Selanjutnya, melalui surat Ketua BPK No. 25/S/1/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, Pertimbangan BPK atas Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Perjanjian Konsesi Jasa (PSAP PKJ) dan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Properti Investasi (PSAP PI) telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Capaian baik tersebut tidak lepas dari komitmen Ditama Revbang dalam pemenuhan bahan pertimbangan yang berkualitas dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Atas capaian baik ini, ke depannya Ditama Revbang akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam penyusunan pertimbangan atas rancangan SAP dan SPIP secara lebih optimal, responsif, berkualitas dan bermanfaat.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 23 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan IKU ini dapat dipertahankan capaiannya sampai dengan Tahun 2024.

8. Indeks Mutu Organisasi

Indikator ini menunjukkan pengukuran persepsi pemangku kepentingan atas mutu organisasi dan ketatalaksanaan. Capaian Indikator Mutu Organisasi diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan menghitung tingkat kepuasan dalam skala indeks kepuasan, yaitu sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 8 Indeks Mutu Organisasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,90)
Realisasi	Memuaskan (3,96)	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,11)
Capaian	104,21%	105,12%	105,38%
Perubahan Realisasi (Δ)		+0,14	+0,1

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi tahun 2021 berada pada kategori Sangat Memuaskan dengan nilai 4,11 dan di atas target yang ditetapkan pada kategori Memuaskan dengan nilai 3,90, sehingga capaiannya sebesar 105,38%. Capaian ini mengindikasikan bahwa mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah dapat memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan dalam sistem pengendalian mutu (SPM) BPK. Untuk mempertahankan capaian ini, ke depannya Ditama Revbang akan terus memastikan SPKN selaras dengan standar internasional. Salah satu aktivitas yang juga merupakan bagian implementasi IS Internalisasi dan Eksternalisasi yaitu penyusunan kerangka pernyataan profesional BPK (*BPK Framework of Professional Pronouncements*).

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh peran aktif Ditama Revbang dalam peningkatan dukungan kelembagaan sebagai bagian dari unsur SPM BPK. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 8 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Mutu Organisasi	Memuaskan (3,9)	Memuaskan (3,9)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (3,95)	Sangat Memuaskan (4,0)	Sangat Memuaskan (4,11)	102,75%

Tabel 25 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi terhadap target Tahun 2024 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

9. Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun Renstra 2020-2024 yang mengukur sejauh mana perangkat lunak yang dihasilkan dapat diterapkan. Capaian Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan diukur berdasarkan survei yang dilaksanakan secara *self assessment* dengan menghitung tingkat keterterapan, yaitu :

- 1,00 - 1,99 = tidak dapat diterapkan
- 2,00 - 2,99 = sulit diterapkan
- 3,00 - 3,99 = dapat diterapkan
- 4,00 - 5,00 = mudah diterapkan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 9 Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	Mudah Diterapkan (4,0)	Mudah Diterapkan (4,10)
Realisasi	NA*	Mudah Diterapkan (4,08)	Mudah Diterapkan (4,08)
Capaian	NA*	102%	99,51%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan pada Tahun 2021 adalah sebesar 4,08 (Mudah Diterapkan), di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,10 (Mudah Diterapkan), sehingga capaiannya sebesar 99,51%. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pemutakhiran perangkat lunak dan pelaksanaan sosialisasi terhadap perangkat lunak. Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan pencapaian IKU ini, Ditama Revbang akan lebih memperhatikan penambahan contoh-contoh kasus dalam penyusunan perangkat lunak serta lebih responsif melaksanakan pemutakhiran menyesuaikan kondisi serta dinamika yang muncul di lapangan. Selain itu, Ditama Revbang akan melaksanakan sosialisasi dengan

lebih intensif melalui kombinasi baik secara virtual maupun tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan dalam Tabel 27 berikut.

Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 9 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan	Mudah diterapkan (4,0)	Mudah diterapkan (4,1)	Mudah diterapkan (4,1)	Mudah diterapkan (4,2)	Mudah diterapkan (4,2)	Mudah diterapkan (4,08)	97,14%

Tabel 27 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 97,14%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

10. Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK

IKU Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan IKU baru di Renstra 2020-2024 yang mengukur kualitas hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Capaian Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK diukur dengan menghitung kualitas pelaporan pemeriksaan BPK yang meliputi akurasi, konsisten, kesesuaian terhadap pedoman.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1 Tahun 2019-2021

IKU 10 Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	73,19%	76,71%
Capaian	NA*	73,19%	76,71%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	+3,52

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020-2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2021 adalah sebesar 76,71% dan masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 76, 71%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena penambahan komponen kriteria dalam pelaksanaan evaluasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ditama Revbang yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas LHP BPK.

Selanjutnya, Ditama Revbang akan berupaya meningkatkan *awareness* terkait hasil evaluasi pelaporan hasil pemeriksaan BPK melalui sosialisasi pada Forum Pengelola.

Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2021 terhadap target tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29 - Perbandingan Realisasi IKU 10 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	76,71%	76,71%

Tabel 29 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap target tahun 2024 telah tercapai sebesar 76,71%. Diharapkan capaian IKU ini dapat ditingkatkan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai seluruhnya pada tahun 2024.

11. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Ditama Revbang juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 1 "Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis" yang diukur keberhasilannya melalui enam belas indikator di atas, Ditama Revbang telah melaksanakan upaya efisiensi sebagai berikut:

- Keikutsertaan dalam kegiatan rapat dengan *Australian National Audit Office* (ANAO) melalui *video conference*. Perubahan Forum Manajer IKU menjadi Forum Pengelola Kinerja (dengan mengikutsertakan tidak hanya pengelola kinerja namun juga pengelola pengetahuan) secara daring. Hal ini merupakan bentuk efisiensi yang berdampak pada penghematan anggaran karena peserta tidak perlu hadir secara fisik.
- Pengukuran tingkat kematangan manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan menggunakan metode *self assessment* dan penyusunan mandiri Modul 101 sebagai percepatan *transfer knowledge*. Selain sebagai salah satu bentuk efisiensi anggaran, hal ini merupakan efisiensi pemanfaatan SDM secara maksimal .
- Optimalisasi penggunaan portal sebagai penyimpanan data/dokumen hasil pekerjaan dan pemanfaatan SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan, SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah), SIKAP (Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik), email dan aplikasi lainnya. Hal ini sebagai bentuk efisiensi pemanfaatan TI terhadap proses bisnis Ditama Revbang.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dengan memperhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Selama Tahun 2021, BPK telah menerapkan strategi pemeriksaan ini dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK, antara lain melalui:

1. Penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat (pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik).
2. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif yang didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan, serta menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK.
4. Peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), keakuratan *database* TLRHP, pemanfaatan aplikasi yang terkait, pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, penyempurnaan mekanisme pengelolaan laporan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan, integrasi sistem informasi BPK, dan pengembangan budaya organisasi.

5. Peningkatan pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pemeriksaan Keuangan dan evaluasi secara berkelanjutan atas persyaratan KAP terdaftar di BPK untuk penjaminan mutu.
6. Penyusunan manajemen pemeriksaan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keselarasan antara rencana pemeriksaan dengan kesimpulan yang dihasilkan.

Strategi ini diampu oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi (AUI), serta didukung oleh Staf Ahli. Pada Tahun 2021, skor kinerja Strategi 2 adalah sebesar 97,40. Capaian tersebut diukur atas 13 IKU yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

IKU ini merupakan IKU yang direformulasi di Tahun 2020. Pada periode Renstra BPK 2016—2019, terdapat indikator kinerja yang hampir sama yaitu IKU Tingkat Implementasi Strategi mengukur kesesuaian rencana pemeriksaan yang ada dalam dokumen perencanaan anggaran dengan kebijakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Renstra BPK 2016—2019 serta kesesuaian antara tujuan audit (*audit objective*) yang dinyatakan dalam program pemeriksaan dengan *Tentative Strategic Audit Objective* (TSAO) yang tertuang dalam kerangka acuan kerja atas tema dan fokus pemeriksaan, sebagai turunan dari dokumen Renstra BPK.

Sebagai hasil evaluasi IKU yang dilaksanakan setiap tahun, maka terdapat perubahan dalam cara pengukuran realisasi IKU ini. Pada Tahun 2020 realisasi IKU terdiri dari perbandingan antara realisasi pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya dibandingkan dengan rencana pemeriksaannya. Kemudian hasil perbandingan tersebut ditambah dengan penambahan skor yang didapat oleh satker atas kontribusi tenaga pemeriksa yang ikut serta pemeriksaan yakni pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya. Pada Tahun 2021, realisasi IKU ini diukur berdasarkan nilai perbandingan realisasi pemeriksaan dengan rencana pemeriksaannya. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 30 berikut.

Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	100%**	100%
Capaian	NA*	100%**	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

**realisasi IKU 1 pada Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 132,56% karena memperhitungkan penambahan alokasi skor Satuan Kerja, jika tidak memperhitungkan alokasi skor maka realisasi Tahun 2020 adalah 100%

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada Tahun 2021 sebesar 100%, atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya sebanyak 186 pemeriksaan dibandingkan 186 rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal/signifikan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya dukungan komitmen dan peran aktif Kepala Satker atas terlaksananya pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya. Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2021 terhadap proyeksi target tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 31 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan terhadap target tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK senantiasa memastikan keterlibatan aktif dari Unit dan Satuan Kerja dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lainnya.

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 32 berikut.

Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	75%	75%	75%
Realisasi	75,14%	76,48%	78,41%
Capaian	100,18%	101,97%	104,55%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+1,34	+1,93

Berdasarkan pengukuran, IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2021 sebesar 78,41% di atas target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 104,55%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 489.582 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 6.722 rekomendasi, dari total 632.951 rekomendasi yang disampaikan kepada auditee selama periode 2005 sampai dengan 2021.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan dukungan komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,41%	104,55%

Tabel 33 menunjukkan bahwa realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 104,55%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK senantiasa berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pemantauan tindak lanjut rekomendasi dengan *auditee*. Selain itu, BPK melalui Satuan Kerja secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan, agar melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikannya ke BPK.

3. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan, IPH maupun Lembaga Internasional. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 34 berikut.

Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dibandingkan dengan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa di Lingkungan AKN dan AUI. Selama tahun 2021, terdapat 28 permintaan pemeriksaan yang diajukan para pemangku kepentingan yang terdiri dari 22 permintaan terkait pemeriksaan investigatif yang dikoordinasikan oleh AUI dan 4 permintaan dari Lembaga Internasional. Seluruh permintaan pemeriksaan telah dipenuhi oleh BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK bertindak responsif terhadap permintaan pemeriksaan. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 35 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan terhadap target tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk ke depannya, BPK tetap berupaya untuk dapat memberikan perhatian pada isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan

pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

4. Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*

Indikator ini menunjukkan pemanfaatan *Big Data Analytics* (*BDA*) dalam setiap kegiatan pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemeriksaan. *Big Data Analytics* adalah proses meneliti, mengolah data set besar (*Big Data*) untuk mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi dan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam proses audit. Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase pemeriksaan yang memanfaatkan *BDA*.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, dimana *BDA* sedang tahap pembangunan infrastruktur. Pada Tahun 2021, pengukuran IKU ini dilakukan penyesuaian dengan mengukur realisasi atas aktivitas dalam Inisiatif Strategis (IS) *BDA*. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 4 Tingkat Pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i>	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	NA*	50%
Realisasi	NA*	NA*	40,85%
Capaian	NA*	NA*	81,69%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

* merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

Berdasarkan hasil pengukuran IS *BDA*, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* pada Tahun 2021 adalah sebesar 40,85%. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2021 yaitu sebesar 50% maka IKU ini tidak mencapai target dan capaian IKU ini hanya sebesar 81,69%. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i>	40%	50%	65%	80%	100%	40,85%	40,85%

Tabel 37 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* terhadap target Tahun 2024 hanya sebesar 40,85%. Untuk mendukung ketercapaian target IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK telah menyusun *roadmap* Implementasi Inisiatif Strategis pengembangan dan pemanfaatan BDA. *Roadmap* tersebut diharapkan menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan BDA di BPK, untuk kemudian dapat diukur pemanfaatannya.

5. Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK melalui nilai setoran atas rekomendasi yang disampaikan kepada *auditee*. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK yang bernilai uang.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020. Pada Tahun 2021, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur berdasarkan nilai setoran ke kas negara/daerah dibandingkan dengan nilai rekomendasi yang bernilai uang pada lingkup AKN. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan realisasi dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 5 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	NA**	50%
Realisasi	NA*	NA**	45,11%
Capaian	NA*	NA**	90,22%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA**	-

* merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

** pada Tahun 2020, belum ditetapkan target dan pengukuran atas IKU ini

Pada Tahun 2021, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan sebesar 45,11%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga capaiannya sebesar 90,22%. Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2021 terhadap proyeksi target tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020—2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	40%	50%	65%	80%	100%	45,11%	45,11%

Tabel 39 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan terhadap target tahun 2024 baru tercapai sebesar 45,11%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK melalui Satuan Kerja secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang.

6. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal Satuan Kerja melalui hasil

evaluasi LHP oleh Direktorat EPP dan hasil reuiu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2020. Pada periode Renstra BPK 2016—2019, Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan hanya diukur dari pemenuhan QA dan QC Satuan Kerja. Pada periode Renstra BPK 2020-2024, IKU ini diukur berdasarkan hasil QA dan QC Satuan Kerja di Lingkungan AKN dan AUI, hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan di Lingkungan AKN, serta hasil reuiu Itama terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan di Lingkungan AKN.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 40 berikut.

Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 6 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	78,16%	88,52%
Capaian	NA*	78,16%	88,52%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	+10,36

* merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2021 adalah sebesar 88,52% dan lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 88,52%. Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88,52%	88,52%

Tabel 41 menunjukkan bahwa realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan menunjukkan bahwa realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 88,52%. Untuk mendukung ketercapaian target, BPK senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan.

7. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi

Indikator ini menunjukkan intensitas pemanfaatan hasil investigasi oleh instansi penegak hukum. Hasil investigasi tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI), Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA). Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 44 berikut.

Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 2 Tahun 2019-2021

IKU 3 Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	80%	80%	85%
Realisasi	92,53%	90,74%	90%
Capaian	115,66%	113,43%	105,88%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-1,79%	-0,74%

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi pada tahun 2021 adalah sebesar 90% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 85% sehingga capaiannya adalah sebesar 105,88%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil investigasi BPK telah dimanfaatkan secara optimal oleh instansi penegak hukum.

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tren realisasi IKU ini diprediksi akan terus menurun seiring dengan peningkatan jumlah LHP PI maupun PKN yang tidak diimbangi dengan peningkatan kecepatan tindak lanjut oleh Instansi Penegak Hukum. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 apabila diproyeksikan terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	80%	85%	90%	95%	100%	90%	90%

Tabel 45 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai 90%. Diharapkan capaian baik IKU ini dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

8. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja strategi 2 juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

STAF AHLI

1. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kajian yang dibuat Staf Ahli baik jumlah maupun kesesuaian topik dengan bidang tugas. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kajian yang disusun oleh Staf Ahli dengan target penyusunan kajian dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli (kecuali Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah yang selama Tahun 2021 tidak ada pejabatnya) telah berhasil mencapai/melebihi target Tahun 2021 dengan skor kinerja rata-rata sebesar 103,19. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 46 berikut.

Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas		Tahun		
		2019	2020	2021
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	1	2	2
	Realisasi	0	8	4
	Capaian	0%	400%	200%
	Perubahan Realisasi (Δ)		+8	-4
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*	Target	0	0	0
	Realisasi	0	0	0
	Capaian	0%	0%	0%
	Perubahan Realisasi (Δ)		0	0
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	2	2	2
	Realisasi	3	2	2
	Capaian	150%	100%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)		-1	-
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	2	2	2
	Realisasi	4	3	3
	Capaian	200%	150%	150%
	Perubahan Realisasi (Δ)		-1	-
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	2	2	2
	Realisasi	3	7	2
	Capaian	150%	350%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)		+4	-5

* Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah kosong sejak 29 September 2020, sehingga target dan realisasi IKU ini ditetapkan 0%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 47.

Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	2	2	2**	4	4	4	100,00%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*	2	2	2**	4	4	0	0,00%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	2	2	2**	4	4	2	50,00%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	2	2	2**	4	4	3	75,00%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	2	2	2**	4	4	2	50,00%

* Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah kosong sejak 29 September 2020, sehingga target dan realisasi IKU ini ditetapkan 0%

** revisi target Tahun 2022

Tabel 47 menunjukkan bahwa sebagian realisasi IKU Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas di lingkungan Staf Ahli Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai atau bahkan melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemenuhan kajian antara lain optimalisasi teknologi informasi dalam hal pencarian data, melakukan FGD dengan pemilik data atau narasumber terkait, dan berdiskusi dengan Ditama Binbangkum untuk melihat dari sisi hukum dan Direktorat Litbang terkait tata cara penulisan kajian

2. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai peserta dalam seminar dan *workshop*. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah jam pelatihan (JP) dalam seminar dan *workshop* yang diikuti oleh Staf Ahli sebagai peserta dengan JP yang ditargetkan dalam satu tahun.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli (kecuali Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah) telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2021 sebanyak 40 JP. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun		
		2019	2020	2021
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	0 JP	49 JP	59 JP

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun		
		2019	2020	2021
	Capaian	0%	122,50%	147,50%
	Perubahan Realisasi (Δ)	0 JP	+49 JP	+10 JP
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*	Target	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	116 JP	55 JP	0 JP
	Capaian	290%	137,50%	0%
	Perubahan Realisasi (Δ)	+95 JP	-61 JP	-55 JP
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	150 JP	52 JP	55 JP
	Capaian	375%	130%	137,50%
	Perubahan Realisasi (Δ)	+125 JP	-98 JP	+3 JP
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	180 JP	117 JP	52 JP
	Capaian	450%	292,50%	130,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	+178 JP	-63 JP	-65 JP
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	197 JP	55 JP	48 JP
	Capaian	492,5%	137,50%	120,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	+176 JP	+142 JP	-7 JP

* Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah kosong sejak 29 September 2020, sehingga target dan realisasi IKU ini ditetapkan 0%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 seperti disajikan pada Tabel 49 berikut.

Tabel 47 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	59 JP	147,50%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	0 JP	0,00%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	55 JP	137,50%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	52 JP	130,00%

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	48 JP	120,00%

* Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah kosong sejak 29 September 2020, sehingga target dan realisasi IKU ini ditetapkan 0%

Tabel 49 menunjukkan bahwa seluruh realisasi IKU Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta di lingkungan Staf Ahli Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui seminar/*workshop* sebagai peserta antara lain dengan secara aktif mencari seminar/*workshop*, khususnya secara *online* yang dapat diikuti oleh para Staf Ahli.

3. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*/FGD sebagai Narasumber

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai narasumber dalam seminar/*workshop*/FGD. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hari partisipasi Staf Ahli dalam seminar/*workshop*/FGD sebagai narasumber dengan target yang ditetapkan dalam satu tahun.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli (kecuali Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah) telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2021 sebanyak sepuluh hari. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*/FGD sebagai Narasumber pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 50 berikut

Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber	Tahun			
	2019	2020	2021	
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	10 hari	10 hari	10 hari
	Realisasi	0 hari	29 hari	26 hari
	Capaian	0%	290%	260,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	+29 hari	-3 hari
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*	Target	10 hari	10 hari	10 hari
	Realisasi	21 hari	14 hari	0 hari
	Capaian	210%	140%	0,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	-7 hari	-14 hari
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	10 hari	10 hari	10 hari
	Realisasi	11 hari	23 hari	19 hari
	Capaian	110%	230%	190,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	+12 hari	-4 hari
	Target	10 hari	10 hari	10 hari

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		Tahun		
		2019	2020	2021
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Realisasi	25 hari	23 hari	24 hari
	Capaian	250%	230%	240,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	-2 hari	+1 hari
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	10 hari	10 hari	10 hari
	Realisasi	22 hari	12 hari	11 hari
	Capaian	220%	120%	110,00%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	-10 hari	-1 hari

* Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah kosong sejak 29 September 2020, sehingga target dan realisasi IKU ini ditetapkan 0%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 49 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari	26 hari	193,33%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari	0 hari	93,33%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari	19 hari	153,33%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari	24 hari	153,33%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari	11 hari	80%

* Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah kosong sejak 29 September 2020, sehingga target dan realisasi IKU ini ditetapkan 0%

Tabel 51 menunjukkan bahwa hampir seluruh realisasi IKU Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*/FGD sebagai Narasumber di lingkungan Staf Ahli Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui seminar/*workshop*/FGD sebagai narasumber antara lain dengan secara aktif berpartisipasi dalam seminar/*workshop*/FGD yang dapat diikuti oleh para Staf Ahli.

4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja bertujuan untuk mendorong Staf Ahli menyelesaikan laporan kegiatan dan anggaran secara tepat waktu. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah laporan kinerja tahunan, jumlah laporan

kinerja triwulanan, dan jumlah laporan *output* yang disampaikan tepat waktu dan dibandingkan dengan target dalam satu tahun.

Berdasarkan pengukuran, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli pada tahun 2021 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli disajikan pada Tabel 52.

Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		Tahun		
		2019	2020	2021
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-	0%	0%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 53.

Tabel 51 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 53 menunjukkan bahwa seluruh realisasi IKU Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja di lingkungan Staf Ahli Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan *output* dan kinerja antara lain dengan terus memantau penyusunan laporan *output* dan kinerja.

5. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Indikator Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur tingkat kinerja anggaran dari aspek implementasi. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut diukur berdasarkan empat indikator yaitu penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli kecuali Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah telah berhasil mencapai atau melebihi target kinerja implementasi anggaran tahun 2021. Walaupun Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah selama tahun 2021 kosong tetapi tetap ada realisasi anggaran untuk kegiatan operasional rutin kantor seperti penyusunan laporan mingguan, dua mingguan, dan lain-lain. Akan tetapi realisasinya sangat rendah yaitu sebesar 27,96% karena hanya digunakan untuk belanja rutin. Perincian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran masing-masing Staf Ahli dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2019-2021

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun		
		2019	2020	2021
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	83%	83%	83,50%
	Realisasi	33,15%	85,77%	99,99%

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun		
		2019	2020	2021
	Capaian	39,94%	103,34%	119,75%
	Perubahan Realisasi (Δ)	19,78%	52,62%	+14,22%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	83%	83%	83,50%
	Realisasi	83,25%	96,36%	27,96%
	Capaian	100,30%	116,10%	33,49%
	Perubahan Realisasi (Δ)	-3,00%	13,11%	-68,40%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	83%	83%	83,50%
	Realisasi	88,75%	85,48%	85,97%
	Capaian	106,93%	120,48%	102,96%
	Perubahan Realisasi (Δ)	0,15%	-3,27%	+0,49%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	83%	83%	83,50%
	Realisasi	85,03%	86,40%	99,95%
	Capaian	102,45%	104,10%	119,70%
	Perubahan Realisasi (Δ)	69,54%	1,37%	+13,55%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	83%	83%	83,50%
	Realisasi	84,67%	83,49%	85,94%
	Capaian	102,01%	100,59%	102,92%
	Perubahan Realisasi (Δ)	0,96%	-1,18%	+2,45%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 55.

Tabel 53 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	99,99%	116,67%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	27,96%	32,63%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	85,97%	100,32%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	99,95%	116,63%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	85,94%	100,28%

Tabel 55 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Tahun 2021 untuk seluruh Staf Ahli kecuali Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah telah berhasil melebihi target IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja implementasi anggaran antara lain dengan mengimplementasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif” yang diukur keberhasilannya melalui sepuluh indikator di atas, **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK adalah

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Strategi 2 “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”, beberapa **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK diantaranya:

1. Optimalisasi teknologi informasi pada seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT.
2. Peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara. Upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan perlu juga dilakukan melalui pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut, dan menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas diperiksa.
3. Peningkatan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola keuangan negara.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Melalui Strategi 3 “Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal”, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan internal dapat bermanfaat bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Strategi 3 ini diampu oleh Inspektorat Utama (Itama).

Selama Tahun 2021, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, antara lain melalui:

1. Pembangunan dan pengembangan budaya kerja satuan kerja di lingkungan BPK, pembangunan zona integritas, sosialisasi/diseminasi mengenai budaya kerja, nilai dasar BPK, penyiapan Program Inisiatif Strategis (IS) Sistem Manajemen Integritas,

- pembangunan media sosialisasi berbasis *e-learning* yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dalam rangka penyesuaian masa pandemi.
2. Transformasi digital Itama, melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi WASMA dalam rangka mempermudah dan meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Itama terhadap satuan kerja, penyempurnaan aplikasi PPG, WBS, dan beberapa aplikasi yang pada tahun 2021 masih dalam proses penyusunan *blue print*.
 3. Transformasi Itama dalam rangka pencapaian level kapabilitas Itama melalui penilaian mandiri tingkat kapabilitas Itama mencapai level 4 dengan menggunakan model IACM.

Pada Tahun 2021, skor kinerja Strategi 3 sebesar **99,20**. Capaian Kinerja strategi tersebut diukur berdasarkan pencapaian atas 12 IKU. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi 3 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tingkat Kematangan SPI

Indikator Tingkat Kematangan SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan IKU baru di Tahun Renstra 2020-2024. Indikator ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPI BPK dalam mencapai tujuan pengendalian *intern* sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelenggaraan SPI melalui penerapan unsur-unsur SPI yang terdiri dari *control environment, risk assessment, control activities, communication and information, dan monitoring*. Capaian Indikator Tingkat Kematangan SPI diukur dengan skala sebagai berikut:

- Level 0: Belum ada kebijakan dan prosedur
- Level 1: Rintisan
- Level 2: Berkembang
- Level 3: Terdefinisi
- Level 4: Terkelola dan terukur
- Level 5: Optimum

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 56.

Tabel 54 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3 Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Kematangan SPI	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	Level 3 (3,40)	Level 4 (3,70)
Realisasi	NA*	Level 3 (3,43)	Level 3 (3,43)
Capaian	NA*	100,88%	92,70%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI Tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan pada Tahun 2021 tidak terdapat pengukuran QA atas Tingkat Maturitas SPI oleh BPKP sehingga realisasi menggunakan nilai Tahun 2020. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) atas Maturitas SPI BPK melalui Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Nomor SP-42/D2/05/2020 Tanggal 6 Maret 2020, Tingkat Kematangan SPI BPK berada

pada level 3 (skor 3,43). Realisasi tersebut di bawah target yang berada pada level 4 (3,70) sehingga capaiannya sebesar 92,70%. Untuk meningkatkan capaian IKU ini Itama akan melakukan upaya berupa penetapan skala prioritas dalam mencapai tujuan pengendalian intern melalui penerapan unsur-unsur SPI yang terdiri dari *control environment, risk assessment, control activities, communication and information* dan *monitoring*.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 disajikan pada Tabel 57 berikut.

Tabel 55 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan SPI	Level 3 (3,40)	Level 4 (3,70)	Level 4 (3,70)	Level 4 (4,00)	Level 4 (4,00)	Level 3 (3,43)	85,75%

Tabel 57 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 85,75%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Indikator ini mengukur persepsi para pemangku kepentingan internal atas efektifitas pengawasan yang dilakukan Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar melaksanakan kegiatan revidi yang berkualitas, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh satker yang direvidi. Capaian Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal diukur melalui hasil survei oleh surveyor independen dengan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99: sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99: tidak memuaskan
- 3,00-3,99: memuaskan
- 4,00-5,00: sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 58.

Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3 Tahun 2019-2021

IKU 2 Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	3,90	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)
Realisasi	4,05	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)
Capaian	103,85%	102,44%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,15	-

Berdasarkan pengukuran, Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Tahun 2021 berada pada level Sangat Memuaskan (4,20), sesuai target yang ditetapkan yaitu level Sangat Memuaskan (4,20), sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IKU

ini pada Tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Itama dinilai oleh pegawai sudah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPK. Hal tersebut didukung dengan adanya komitmen dari Itama untuk terus meningkatkan kompetensi pengawas internal dan komunikasi dengan satker yang direviu. Komunikasi yang baik dengan satker yang direviu dapat mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut dan perbaikan kinerja terkait rekomendasi hasil reviu. Atas capaian baik ini, Itama akan terus meningkatkan kompetensi pemeriksa di Itama dan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Itama agar hasil pengawasan Itama dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satker-satker di BPK.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 57 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Sangat Memuaskan (4,1)	Sangat Memuaskan (4,2)	Sangat Memuaskan (4,3)	Sangat Memuaskan (4,4)	Sangat Memuaskan (4,5)	Sangat Memuaskan (4,2)	93,33%

Tabel 59 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 93,33%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

3. Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM

Indikator ini mengukur persentase satker BPK yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) berdasarkan hasil reviu tim Kementerian PAN dan RB. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker-satker di BPK untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Capaian Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM tersebut diukur dengan membandingkan jumlah satker yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dengan jumlah satker yang direncanakan mendapat predikat WBK/WBBM. Formula untuk mengukur IKU ini berbeda dengan Tahun Renstra sebelumnya sehingga nilai yang dicapai pada Tahun Renstra 2020-2024 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai dari Tahun Renstra sebelumnya.

Secara rinci, capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 60 berikut.

Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3 Tahun 2019-2021

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	15*	100% (3 satker)	100% (3 satker)
Realisasi	16*	133% (4 satker)	300% (9 satker)

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	Tahun		
	2019	2020	2021
Capaian	106,67%	133%	300%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	NA	+167

*realisasi Tahun 2019 merupakan jumlah akumulasi satker yang meraih predikat WBK dari Tahun 2015

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM pada Tahun 2021 adalah sebesar 300% (9 satker), di atas target yang ditetapkan sebesar 100% (3 satker), sehingga capaiannya sebesar 300%. Capaian tersebut mengindikasikan adanya komitmen satuan kerja dalam menegakkan integritas serta melaksanakan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan.

Realisasi IKU ini Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat tercapai terutama karena komitmen kuat satuan kerja terkait untuk melakukan inovasi dan proses yang berkesinambungan guna memenuhi persyaratan pencapaian WBK/WBBM. Atas capaian baik ini Itama akan terus melakukan upaya moderasi dan koordinasi untuk mengatasi beberapa kendala seperti perbedaan mindset mengenai makna layanan BPK dan belum harmonisasinya beberapa kebijakan di BPK terkait kegiatan pembangunan ZI. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 disajikan pada Tabel 61.

Tabel 59 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	100% (3 satker)	100% (3 satker)	100% (3 satker)	100 (3 satker)	100% (3 satker)	300% (9 satker)	300%

Tabel 61 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM pada Tahun 2021 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

4. Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin

Indikator ini mengukur simpulan hasil pemeriksaan dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik. Indikator ini bertujuan untuk menilai upaya Inspektorat Utama (dhi. Inspektorat PI) dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik. Capaian Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin diukur melalui dua Sub IKU yaitu: 1) kesesuaian antara simpulan dalam LHP Itama atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin dengan putusan MKKE dan 2) kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang

dilaksanakan dengan jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang direncanakan. Formula ini berbeda dengan Tahun Renstra sebelumnya dimana Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin merupakan IKU Generik sehingga nilai realisasinya merupakan nilai realisasi atas masing-masing unit/satuan kerja.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 62.

Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3 Tahun 2019-2021

IKU 4 Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	300%	260%
Capaian	100%	300%	260%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	NA	-40

*Realisasi Tahun 2019 merupakan capaian atas masing-masing satker

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin pada Tahun 2021 adalah sebesar 260%, di atas target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 260%. Ketercapaian atas IKU ini diperoleh karena selama Tahun 2021 Itama telah menerbitkan sepuluh laporan atas dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai. Selain itu, Itama juga telah menyelenggarakan lima kegiatan sosialisasi/*workshop* terkait penegakan kode etik/disiplin pegawai. Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah sosialisasi/*workshop* yang direncanakan sebanyak 1 kegiatan. Atas capaian baik tersebut, Itama akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan berbagai kegiatan dalam rangka penegakan kode etik/disiplin pegawai. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 disajikan pada Tabel 63 berikut.

Tabel 61 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	260%	260%

Tabel 63 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin pada Tahun 2021 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal

Indikator ini mengukur intensitas satker pemeriksaan di BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi atas revidu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan oleh Inspektorat PKMP dan rekomendasi atas pemeriksaan internal revidu pengendalian mutu kelembagaan oleh Inspektorat PIMK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama dalam percepatan pengimplementasian rekomendasi hasil pengawasan Itama. Capaian

Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal diukur dengan formula sebagai berikut.

$$\frac{\text{Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal}}{\text{Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal}} = \frac{(a + c)}{(b + d)}$$

Keterangan:

- a = Jumlah rekomendasi atas reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan status selesai dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- b = Jumlah rekomendasi atas reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti.
- c = Jumlah rekomendasi atas pemeriksaan internal dan reviu pengendalian mutu kelembagaan dengan status selesai dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- d = Jumlah rekomendasi atas pemeriksaan internal dan reviu pengendalian mutu kelembagaan yang harus ditindaklanjuti.

Formula tersebut berbeda dengan Tahun Renstra sebelumnya dimana Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Pemeriksaan Internal dan Reviu Pengendalian Mutu Kelembagaan merupakan IKU yang terpisah.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3 Tahun 2019-2021

IKU 5 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Tahun			
	2019		2020	2021
	Pemeriksaan	Kelembagaan		
Target	95,00%	95,00%	95,00%	96,00%
Realisasi	99,21%	92,67%	84,60%	86,86%
Capaian	104,43%	97,55%	89,05%	90,48%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	NA	NA	+2,26

*Realisasi Tahun 2019 atas Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Pengendalian Mutu Kelembagaan pada IKU merupakan IKU yang terpisah

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Tahun 2021 adalah sebesar 86,86%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 96%, sehingga capaiannya sebesar 90,48%. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2021 masih merupakan masa transisi dari pemanfaatan Aplikasi WASMA untuk proses penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan internal yang mulai digunakan Tahun 2020.

Meskipun belum mencapai target, realisasi IKU ini pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antara Itama dengan satker sehingga mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 disajikan pada Tabel 65.

Tabel 63 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	100,00%	86,86%	86,86%

Tabel 65 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 86,86%. Diharapkan Itama dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut sehingga target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

6. Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4

Indikator Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM merupakan IKU baru pada Tahun 2020-2024 yang mengukur pemenuhan kriteria pada enam *Key Process Area* (KPA) IACM Level 4 untuk mendukung upaya penguatan fungsi pengawasan internal BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan internal. Adapun enam KPA IACM tersebut meliputi *Service and Role of Internal Auditing, People Management, Profesional Practices, Performance Management & Accountability, Organizational Relationship and Cultures, dan Governance Structures*. IACM sendiri merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan internal sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu sebagai berikut.

- Level 1 – *Initial* = tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
- Level 2 – *Infrastructure* = prosedur dan praktik audit internal berulang dan berkelanjutan
- Level 3 – *Integrated* = praktik profesional dan manajemen audit internal diterapkan secara seragam
- Level 4 – *Managed* = audit internal mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
- Level 5 – *Optimizing* = audit internal belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan berkelanjutan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 66.

Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3 Tahun 2019-2021

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	40%	60%

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	Tahun		
	2019	2020	2021
Realisasi	NA	40%	76,25%
Capaian	NA	100%	127,08%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-	+36,25

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM pada Tahun 2021 adalah sebesar 76,25%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga capaiannya sebesar 127,08%. Sampai dengan Tahun 2021, fungsi pengawasan internal BPK yang dhi. diampu oleh Itama, telah memenuhi 183 kriteria dari 240 kriteria IACM Level 4 yang harus dipenuhi.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut terutama didukung oleh komitmen pimpinan dan koordinasi antar satker yang baik di lingkup Itama dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal BPK secara maksimal. Selanjutnya, Itama akan melakukan percepatan pemenuhan komponen IACM Level 4 dengan meningkatkan koordinasi antar satker di Itama untuk pemenuhan target di Tahun 2022. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 disajikan pada Tabel 67 berikut.

Tabel 65 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020—2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	40%	60%	100%	100%	100%	76,25%	76,25%

Tabel 67 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4 pada Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 76,25%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Itama juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 3 “Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal” yang diukur keberhasilannya melalui dua belas indikator di atas, **upaya efisiensi** yang telah dilakukan oleh Itama adalah sebagai berikut.

- Pemanfaatan media daring dalam pelaksanaan sosialisasi/konsultasi/bimbingan kepada satuan kerja untuk kegiatan pembanguna ZI maupun berkomunikasi dengan pihak KemenPAN dan RB sebagai tim penilai nasional. Hal ini merupakan bentuk efisiensi yang berdampak pada penghematan anggaran.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi baik WASMA terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi maupun aplikasi SMP, SIAP, portal e-Audit, dan SIPTL dalam pelaksanaan

kegiatan reviu internal. Hal ini sebagai bentuk efisiensi pemanfaatan TI dalam proses bisnis di lingkungan Itama.

- Peningkatan koordinasi dengan Badan Diklat terkait penyelenggaraan diklat internal /workshop/FGD yang dapat melibatkan seluruh pegawai di Itama dengan topik sesuai kebutuhan dan tupoksi unit kerja masing-masing pegawai. Hal ini merupakan bentuk efisiensi waktu.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan Strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara. Strategi 4 ini diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Badiklat PKN menyediakan pelayanan diklat bagi internal organisasi dan pihak eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan mencetak ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi penyelenggara diklat pemerintah dan lembaga diklat swasta yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Badiklat PKN diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat. Peningkatan kompetensi paska diklat dan kemampuan mengimplementasikan materi diklat. Dengan demikian diharapkan kinerja BPK menjadi semakin baik.

Selama Tahun 2021, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan Badiklat PKN sebagai pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Langkah-langkah yang ditempuh tersebut antara lain melalui pengalihan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS) dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan. Untuk meningkatkan kualitas layanan kediklatan telah dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran. Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Pada Tahun 2021, skor kinerja Strategi 4 sebesar **101,59**. Ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 4 ini diukur atas 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja

Indikator Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja merupakan indikator baru pada Renstra BPK 2020-2024. Indikator ini menunjukkan kinerja satuan kerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan atau kuantitas yang dapat dicapai oleh satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya, dhi. terkait *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* pada satker pemeriksaan. Indikator ini mengukur peningkatan kinerja satuan kerja atas keberhasilan program pelatihan individu yang berdampak pada peningkatan kinerja individu dan kinerja satuan kerja dalam hal pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui *QA* dan *QC*. Indikator ini merupakan evaluasi level 4 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan diklat, di mana pada periode Tahun 2021 yang diukur adalah capaian atas pemenuhan *QA* dan *QC* pada satker pemeriksaan. Capaian Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja diukur dengan membandingkan jumlah satker pemeriksaan yang memenuhi kinerja atas *QA* dan *QC* pemeriksaan sebesar 100% dengan jumlah satker pemeriksaan yang menerapkan *QA* dan *QC*.

Berdasarkan pengukuran, 59 satuan kerja pemeriksaan telah 100% menerapkan *QA* dan *QC* sehingga realisasi Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja pada Tahun 2021 sebesar 100% dan sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	87,50%	100%
Capaian	NA*	87,50%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+87,50%	+2,50%

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 69.

Tabel 67 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 69 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

2. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya

Indikator kinerja Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya merupakan indikator baru pada periode Renstra BPK 2020-2024. Indikator ini menunjukkan keberhasilan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Indikator Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang meningkat kinerjanya dengan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang diukur peningkatan kinerjanya.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 68 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 2 Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	50%	51%
Realisasi	NA*	94,31%	96,97%
Capaian	NA*	188,62%	190,14%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+94,31%	+2,66%

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran dari 66 alumni diklat yang dievaluasi, terdapat 64 alumni yang meningkat kinerjanya. Dengan demikian, realisasi Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya pada Tahun 2021 sebesar 96,97%, di atas target yang ditetapkan sebesar 51%, sehingga capaiannya sebesar 190,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka terdapat peningkatan sebesar 2,66%.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 71.

Tabel 69 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	50%	51%	52%	53%	54%	96,97%	179,57%

Tabel 71 menunjukkan bahwa realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya pada Tahun 2021 telah melebihi target Tahun 2024 yakni sebesar 179,57%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat

Indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat merupakan indikator baru pada periode Renstra BPK 2020-2024. Indikator ini menunjukkan kepuasan atasan langsung atas kinerja bawahan yang telah mengikuti diklat dan mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni

Diklat pada Tahun 2021 diukur melalui survei internal. Survei internal ini menggunakan skala pengukuran 1 – 5 di mana nilai:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 72.

Tabel 70 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 3 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	3,50	3,60
Realisasi	NA*	4,05	4,44
Capaian	NA*	115,71%	123,33%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+4,05	+0,39

* merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat pada Tahun 2021 mencapai Sangat Memuaskan (4,44), di atas target yang ditetapkan yakni Memuaskan (3,60), sehingga capaiannya sebesar 123,22%. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 73.

Tabel 71 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020—2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	3,50	3,60	3,80	3,90	4,00	4,44	111%

Tabel 73 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat pada Tahun 2021 telah melebihi target Tahun 2024 yakni sebesar 111%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

4. Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"

Indikator ini menunjukkan standar nilai kelulusan yang dipersyaratkan berupa nilai minimum yang wajib dipenuhi oleh pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan kepemimpinan. Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta diklat fungsional dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal "Memuaskan" dengan jumlah keseluruhan peserta diklat fungsional dan kepemimpinan.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 72 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 4 Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	40%	50%	55%
Realisasi	83,22%	100%	99,15%
Capaian	208,05%	200%	180,27%
Perubahan Realisasi (Δ)	+41,92	+16,78	-0,85

Berdasarkan pengukuran, realisasi Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" pada Tahun 2021 sebesar 99,15%, di atas target yang ditetapkan sebesar 55%, sehingga capaiannya sebesar 180,27%. Ketercapaian atas indikator ini terjadi karena dari 936 orang peserta Diklat Fungsional dan Kepemimpinan di Tahun 2021, sebanyak 928 orang peserta lulus dengan predikat minimal "Memuaskan".

Meskipun mencapai target, realisasi IKU ini pada Tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena jumlah peserta pada Tahun 2021 meningkat hampir sebanyak 33,5 kali lipat dibanding peserta yang diukur pada Tahun 2020 yakni hanya berjumlah sebanyak 28 orang peserta. Peningkatan jumlah peserta ini mempengaruhi probabilitas tingkat kelulusan peserta. Namun demikian, hal ini menjadi masukan bagi Badiklat PKN untuk terus meningkatkan komitmen dalam memberikan layanan kediklatan yang mampu meningkatkan persentase lulusan diklat dengan predikat minimal "Memuaskan". Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 75.

Tabel 73 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	50%	55%	60%	65%	70%	99,15%	141,64%

Tabel 75 menunjukkan bahwa realisasi IKU Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 141,64%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

5. Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi

Indikator ini menunjukkan persepsi peserta diklat dan peserta sertifikasi terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan sertifikasi yang mencakup sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran (berupa kurikulum, silabus, modul, dll). Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi diukur melalui survei internal dan menunjukkan tingkat kepuasan peserta atas sarana dan prasarana, tingkat kepuasan atas kualitas fasilitator, dan tingkat kepuasan atas media pembelajaran. Survei internal ini menggunakan skala pengukuran 1 – 5 di mana nilai:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 76.

Tabel 74 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 5 Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	4,10	4,20	4,20
Realisasi	4,17	4,35	4,43
Capaian	101,71%	103,57%	105,48%
Perubahan Realisasi (Δ)	+0,13	+0,18	+0,08

Berdasarkan pengukuran, realisasi Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi pada Tahun 2021 mencapai Sangat Memuaskan (4,43), di atas target yang ditetapkan yakni Sangat Memuaskan (4,20) sehingga capaiannya sebesar 105,48%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Badiklat PKN terus berkomitmen dalam menyediakan sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan sertifikasi.

Pada Tahun 2020, indikator kinerja ini merupakan indikator yang diampu bersama oleh satuan kerja di lingkup Badiklat PKN yaitu Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Pusrengar Diklat PKN) dan Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Pustandev Diklat PKN). Namun sejak Tahun 2021 dengan adanya Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK maka indikator kinerja ini diampu oleh Pusrengar dan satuan kerja baru yakni Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Pusdiktar Diklat PKN).

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 77.

Tabel 75 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	4,20	4,20	4,30	4,30	4,40	4,43	100,68%

Tabel 77 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100,68%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

6. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi

Indikator ini menunjukkan tingkat pemenuhan atas sertifikasi dan akreditasi dalam bentuk capaian tingkat kelulusan dalam program sertifikasi dan akreditasi. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi diukur dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi} = \left[50\% \times \left(\frac{a}{b} \right) \right] + \left[50\% \times \left(\frac{c}{d} \right) \right]$$

Keterangan:

a = Jumlah peserta sertifikasi keahlian PKN dan sertifikat kompetensi teknis yang lulus

b = Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi keahlian PKN dan kompetensi teknis

c = Jumlah perangkat akreditasi yang disusun

d = Jumlah perangkat akreditasi yang direncanakan untuk disusun

Untuk program akreditasi, capaian pada Tahun 2021 diukur atas pemenuhan penyusunan perangkat akreditasi karena Badiklat PKN belum melaksanakan kegiatan akreditasi dan masih dalam proses penyusunan perangkat akreditasi.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 78.

Tabel 76 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	85%	85%	90%
Realisasi	100%	71,02%	85,54%
Capaian	117,65%	83,56%	95,04%
Perubahan Realisasi (Δ)	+10,96	-28,98	+14,52

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi pada Tahun 2021 sebesar 85,54%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 95,04%. Data realisasi ini didapat dari perbandingan antara 1.241 orang peserta sertifikasi yang lulus dari total sejumlah 1.746 peserta. Belum tercapainya target atas indikator kinerja ini terjadi karena belum optimalnya pemberian layanan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang dapat mempengaruhi tingkat kelulusan peserta. Selanjutnya, Badiklat PKN akan terus mengupayakan peningkatan kualitas atas ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitator, teknologi pembelajaran, media pembelajaran berupa kurikulum, silabus, modul dan bahan ajar sehingga tingkat kelulusan peserta sertifikasi dapat meningkat. Untuk perangkat akreditasi, Badiklat PKN telah berhasil menyusun perangkat akreditasi sejumlah satu perangkat sesuai dengan yang direncanakan.

Meskipun realisasi pada Tahun 2021 masih di bawah target, realisasi IKU pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena

adanya komitmen yang kuat oleh Badiklat PKN untuk dapat memberikan layanan program sertifikasi yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan persentase lulusan peserta sertifikasi. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 79.

Tabel 77 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	85%	90%	95%	100%	100%	85,54%	85,54%

Tabel 79 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 85,54%. Diharapkan IKU ini dapat tercapai realisasinya setiap tahun hingga Tahun 2024.

7. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN

Indikator ini menunjukkan terjalannya kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi oleh Badiklat PKN dengan para mitra kerja samanya. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN merupakan IKU baru pada periode Renstra BPK 2020-2024 dan diukur melalui survei yang dilakukan oleh PT Wahana Data Utama sebagai surveyor independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 80.

Tabel 78 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 7 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	4,20	4,20
Realisasi	NA*	4,21	4,19
Capaian	NA*	100,24%	99,76%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+4,21	-0,02

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN pada Tahun 2021 mencapai Sangat Memuaskan (4,19), di bawah target yang ditetapkan yakni Sangat Memuaskan (4,20), sehingga capaiannya sebesar 99,76%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pemanfaatan media digital dalam kegiatan kediklatan selama pandemi COVID-19 namun belum optimalnya pemahaman atas penggunaan media digital tersebut (aplikasi *e-learning*, *slide*, video, dll) oleh para

pemangku kepentingan mempengaruhi persepsi atas tingkat kepuasan para mitra kerja Badiklat PKN. Selanjutnya, Badiklat PKN akan berusaha meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan atas penggunaan media digital dalam kegiatan kediklatan sehingga pemahaman para pemangku kepentingan atas penggunaan media digital dapat meningkat.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi masukan oleh Badiklat PKN agar lebih berkomitmen dalam menjalin kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan para mitra kerjanya. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 81.

Tabel 79 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	4,20	4,20	4,30	4,30	4,40	4,19	95,23%

Tabel 81 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 95,23%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

8. Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran

Indikator Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2021 dan pada periode Renstra BPK 2020-2024. Indikator kinerja ini menunjukkan peran Badiklat PKN dalam memastikan ketersediaan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar. Capaian indikator ini diperoleh dari persentase atas pemenuhan akademik dan teknologi pembelajaran, yaitu perbandingan antara jumlah kurikulum, silabus, modul, bahan ajar dan teknologi pembelajaran yang disusun, disediakan, dan digunakan dengan yang direncanakan untuk disusun atau digunakan dalam proses pembelajaran.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 80 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 4 Tahun 2019-2021

IKU 8 Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	NA*	90%
Realisasi	NA*	NA*	100%
Capaian	NA*	NA*	111,11%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	+111,11%

*merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan periode Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, di atas target yang ditetapkan yakni sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111,11%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 8 pada Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 83.

Tabel 81 - Perbandingan Realisasi IKU 8 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran	NA	90%	91%	92%	93%	100%	107,53%

Tabel 83 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran Tahun 2021 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

9. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Badiklat PKN juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 4 “Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara” yang diukur keberhasilannya melalui 14 indikator di atas, **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK adalah:

1. Mengembangkan BPK CorpU sehingga pegawai BPK dapat “*Learning from Everywhere*”. Dengan adanya CorpU, pegawai BPK tidak harus ke Badiklat PKN bila ingin meningkatkan kompetensinya. BPK CorpU mengoptimalkan platform pengembangan kompetensi yang telah ada seperti Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (SISDIKLAT). Selain itu, Badiklat PKN juga mengembangkan platform *digital learning system* untuk membentuk lingkungan pembelajaran yang massif dan terbuka dengan dukungan teknologi seperti:
 - **MOOC (Massive Online Open Course)**. MOOC merupakan platform digital pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan yang dapat diakses di mana dan kapan saja. MOOC dikemas dalam paket menarik dan fleksibel, sehingga memudahkan pegawai untuk menyerap materi dan melakukan assessment mandiri. MOOC dirancang untuk menjadi pusat proses pembelajaran di BPK termasuk sebagai data center dari semua konten pembelajaran. Karena BPK merupakan lembaga pemeriksa eksternal pemerintah, maka materi utama MOOC adalah semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara. Untuk menarik minat pegawai memanfaatkan MOOC, maka MOOC harus mudah diakses, fitur-fiturnya lengkap,

mudah digunakan, kontennya mengikuti perkembangan pengetahuan terkini, dan sesuai kebutuhan pegawai.

- **Sipendi (Sistem Informasi Pemenuhan Diklat).** Sipendi adalah sistem informasi yang digunakan untuk memantau pengembangan kompetensi pegawai. Sipendi dapat diakses oleh individu pegawai dan atasan pegawai tersebut. Sipendi juga diintegrasikan dengan proses LNA (*Learning Need Analysis*) untuk mempermudah usulan topik pembelajaran beserta metode pembelajaran yang dibutuhkan
 - **Simpoel (Sistem Informasi *Pool of Experts on Learning*).** Simpoel merupakan sistem informasi database *experts* dalam bidang tertentu yang dimiliki BPK. Melalui Simpoel, BPK CorpU dapat mengelola *experts* yang memiliki berbagai pengetahuan di BPK untuk dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran melalui penunjukan sebagai fasilitator diklat dan ikut dalam pengembangan materi pembelajaran.
2. Melanjutkan pemanfaatan TI dalam proses diklat dan sertifikasi karena dunia masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagian besar diklat masih dilaksanakan secara daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS). Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (*online*) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu;
 3. Melaksanakan diklat secara mandiri oleh masing-masing satuan kerja yang telah disetujui oleh Badiklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara mandiri antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja barang.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, sehingga Strategi 5 tentang “Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” dirumuskan untuk (1) memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara; (2) memperkuat aspek-aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, agar proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain; serta (3) meningkatkan peran aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian negara, baik yang disebabkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya. Strategi 5 diampu oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN).

Selama Tahun 2021, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, antara lain melalui:

- Peningkatan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop* serta *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para ahli, serta berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya;
- Pelaksanaan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum;
- Penggalian data dan informasi atas seluruh kasus tuntutan perbendaharaan dan atas seluruh permintaan rekomendasi yang masuk;
- Kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemastian atas ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK,
- Kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, dan pelaksanaan proses legislasi produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK;
- Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk FGD terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK dan sosialisasi produk hukum atas produk hukum BPK; serta
- Meningkatkan kualitas pendampingan keterangan ahli dan penanganan perkara yang melibatkan BPK baik di persidangan maupun di luar persidangan.

Pada Tahun 2021, skor kinerja Strategi 5 sebesar **99,69**. Ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 5 ini diukur atas 12 IKU. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi 5 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK

IKU ini merupakan indikator baru pada Renstra BPK 2020-2024. IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK menunjukkan tingkat kontribusi BPK dalam memberikan bahan pertimbangan atas rancangan dan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK. Capaian indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK yang dihasilkan dengan yang direncanakan akan diberikan.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 84.

Tabel 82 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5 Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	100%	100%
Capaian	NA*	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+100%	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Sesuai dengan target IKU Tahun 2021, Ditama Binbangkum telah menyusun tiga pendapat hukum yang diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- Masukan atas Kajian Awal Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara;
- Pendapat Hukum atas Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pemeriksaan Eksternal di BPK; dan
- Pendapat Hukum atas Implikasi Pembentukan serta Kedudukan Badan Bank Tanah dalam Konsep Keuangan Negara.

Dengan demikian Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% dan sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 85.

Tabel 83 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 85 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

2. Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK

IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK menunjukkan tingkat pemenuhan atas ketersediaan peraturan yang dibutuhkan BPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Capaian IKU tersebut diukur dengan membandingkan jumlah rancangan Peraturan BPK yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah rancangan Peraturan BPK yang harus diselesaikan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Program Legislasi BPK Tahun 2020-2024.

Pada Renstra 2016-2019 nomenklatur IKU Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK adalah "Tingkat Pemenuhan Rancangan Peraturan yang Terkait dengan Tugas dan Wewenang BPK". Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 86 berikut.

Tabel 84 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5 Tahun 2019-2021

IKU 2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-

Pada Tahun 2021, Ditama Binbangkum telah menyusun empat Peraturan BPK sesuai dengan target IKU. Keempat peraturan BPK tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
2. Peraturan BPK tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa.
3. Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK dan Akuntan Publik.

Dengan demikian, Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 85 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 87 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

3. Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK

IKU ini merupakan indikator baru pada periode Renstra BPK 2020-2024. IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK menunjukkan tingkat respon Ditama Binbangkum dalam memenuhi permintaan layanan bantuan dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK. Capaian atas IKU Tingkat

Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK diukur dengan membandingkan jumlah layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK yang diberikan dengan jumlah permintaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK pada Tahun 2021 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK dapat dilihat pada Tabel 88 berikut.

Tabel 86 - Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2021

Satuan Kerja	Jenis Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah Pemenuhan	Capaian
Direktorat LPBH	Bantuan Hukum	22	22	100%
Direktorat KHK	Konsultasi Hukum	88	88	100%
Jumlah		110	110	100%

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 89 berikut.

Tabel 87 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5 Tahun 2019-2021

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	100%	100%
Capaian	NA*	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+100%	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Pada Tahun 2021, Ditama Binbangkum telah memenuhi seluruh permintaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK. Dengan demikian realisasi dan capaian IKU ini sama dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya. Sementara itu, perbandingan realisasi Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 90 berikut.

Tabel 88 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 90 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024

telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

4. Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD

IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD merupakan penyebutan baru untuk IKU dari Renstra 2016-2019 dengan nomenklatur awal "Tingkat Penyelesaian Penetapan Kerugian Perbendaharaan". IKU ini menunjukkan peran Ditama Binbangkum dalam menilai atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. IKU ini bertujuan mendorong proses percepatan pengembalian kerugian negara/daerah. Melalui IKU ini diharapkan proses penilaian dan penetapan kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga kerugian negara/daerah dapat lebih cepat dipulihkan.

Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD diukur dengan membandingkan jumlah kasus yang telah selesai diproses dengan jumlah kasus yang masuk ke Panitera. Kasus yang masuk diukur secara kumulatif atas seluruh kasus yang telah didaftarkan dalam daftar kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 91 berikut.

Tabel 89 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5 Tahun 2019-2021

IKU 4 Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	99,44%	100%	100%
Capaian	99,44%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+0,56%	-

Pada Tahun 2021, BPK telah menilai dan menetapkan sebanyak 69 dari 69 kasus bendahara yang teregister. Dengan demikian, Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan dalam Tabel 92 berikut.

Tabel 90 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 92 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

5. Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR

IKU ini merupakan indikator baru pada periode Renstra BPK 2020-2024. Indikator kinerja ini menunjukkan kontribusi Ditama Binbangkum dalam penyelesaian bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR. Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR diukur dari persentase atas penyelesaian permintaan rekomendasi penghapusan piutang, yaitu perbandingan antara jumlah bahan rekomendasi yang disampaikan, dengan jumlah permintaan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah.

Pada Tahun 2021, Ditama Binbangkum berhasil menyelesaikan seluruh permintaan rekomendasi penghapusan piutang TP/TGR sebanyak dua permintaan. Dengan demikian, Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berasal dari TP/TGR pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 93 berikut.

Tabel 91 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5 Tahun 2019-2021

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	100%	100%
Realisasi	NA*	100%	100%
Capaian	NA*	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+100%	-

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020–2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 94 berikut.

Tabel 92 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/ Daerah yang Berasal dari TP/TGR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 94 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

6. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan periode Renstra BPK 2020-2024. Indikator kinerja ini menunjukkan kontribusi Ditama Binbangkum dalam pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya. Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya diukur dari persentase pemenuhan atas permintaan pertimbangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, yaitu perbandingan antara jumlah bahan pertimbangan yang disampaikan, dengan jumlah bahan pertimbangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang diminta.

Pada Tahun 2021, Ditama Binbangkum berhasil menyelesaikan seluruh permintaan rekomendasi penghapusan piutang TP/TGR sebanyak enam permintaan. Dengan demikian, Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 6 pada Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 95 berikut.

Tabel 93 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 5 Tahun 2019-2021

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	100%

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	Tahun		
	2019	2020	2021
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	+100%

*merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 periode Renstra BPK 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024 disajikan pada Tabel 96 berikut.

Tabel 94 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 96 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Ditama Binbangkum juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Selain berupaya mencapai Strategi 5 “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” yang diukur keberhasilannya melalui dua belas indikator di atas, Ditama Binbangkum PKN juga berupaya meningkatkan efisiensi dengan berbagai langkah sebagai berikut.

- Melaksanakan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum agar konsultasi hukum terjangkau dan mudah. Dengan bantuan Sistem Manajemen Hukum, layanan konsultasi hukum dapat dilaksanakan baik pada tahap pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pada tahap pelaporan.
- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya serta melaksanakan penggalian data dan informasi atas seluruh permintaan rekomendasi BPK dalam penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari TP/TGR.
- Melaksanakan kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang BPK melalui konsep produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi 6 dilaksanakan pada arah kebijakan peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal ini merupakan wujud perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Selama Tahun 2021, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, antara lain melalui pelaksanaan komunikasi dan pengelolaan informasi secara terkoordinasi dan berkualitas, pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan sistem merit, pengelolaan keuangan BPK secara andal, transparan, akuntabel dan modern, pengelolaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan lingkungan dan efisiensi energi dalam rangka menuju *eco-office* dan *smart office*, peningkatan fungsi *monitoring* implementasi kebijakan BPK serta penerapan pola kerja berbasis sistem informasi disertai peningkatan keamanan akses data dan informasi.

Pada Tahun 2021, capaian skor Strategi 6 sebesar **97,99**. Ukuran keberhasilan pencapaian Strategi 6 diukur atas 12 indikator kinerja. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. IKU ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Humas dan KSI) dan seluruh Kantor BPK Perwakilan (dhi. Subbag. Humas). Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor Perwakilan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 97 berikut.

Tabel 95 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6 Tahun 2019-2021

IKU 1 Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	4,10	4,00	4,00
Realisasi	3,80	3,96	4,02
Capaian	92,68%	99,00%	100,50%
Perubahan Realisasi (Δ)		+0,16	+0,06

Berdasarkan hasil survei, realisasi Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2021 sebesar 4,02 (Sangat Memuaskan), melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,00 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya sebesar 100,50 %. Hal tersebut mencerminkan bahwa BPK telah berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah, nonpemerintah, pelajar, dan mahasiswa, baik dalam bentuk pertemuan secara fisik/langsung maupun dalam jaringan (misalnya melalui media sosial). Bentuk peningkatan kualitas komunikasi tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.
2. Melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK.
3. Fasilitasi pemeriksaan lembaga internasional dan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 98 berikut.

Tabel 96 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,02	100,50%

Tabel 98 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 berhasil melebihi target dengan capaian sebesar 100,50%. Diharapkan IKU ini dapat terus tercapai setiap tahun hingga Tahun 2024.

2. Penilaian Penerapan Sistem Merit

IKU Penilaian Sistem Merit merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan bertujuan untuk mengukur level keterterapan sistem merit di lingkungan BPK yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Sistem merit adalah kebijakan

dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas. Indeks atau nilai sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit di BPK (sesuai Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit). Capaian Penerapan Sistem Merit tersebut diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh tim penilai mandiri sistem merit BPK, yang kemudian divalidasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menggunakan skala sebagai berikut (sesuai Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019).

- 100 - 174 = buruk
- 175 - 249 = kurang
- 250 - 324 = baik
- 325 - 400 = sangat baik

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 99 berikut.

Tabel 97 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6 Tahun 2019-2021

IKU 2 Penilaian Penerapan Sistem Merit	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	354	359
Realisasi	NA*	354	360,5
Capaian	NA*	100%	100,42%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	+6,50

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran internal, realisasi Penilaian Penerapan Sistem Merit pada Tahun 2021 sebesar 360,50 (sangat baik), melebihi target yang ditetapkan sebesar 359 (sangat baik), sehingga capaiannya sebesar 100,42%.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 100 berikut.

Tabel 98 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Penilaian Penerapan Sistem Merit	354	359	361	363	375	360,5	96,13%

Tabel 100 menunjukkan bahwa realisasi IKU Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 96,13%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai setiap tahun hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem merit antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan dengan pihak internal dan melakukan sosialisasi terkait aturan dan persyaratan dalam proses pengangkatan pegawai ke dalam jabatan.

2. Menambah formasi jabatan yang ada dan/atau membuka formasi pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi.
3. Memetakan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker.
4. Melakukan pendokumentasian terhadap kondisi dan jabatan yang dapat menghambat pemenuhan penempatan pegawai.
5. Menyusun pola karier yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak internal terkait regulasi pemotongan tunjangan kinerja tahun berjalan berdasarkan penilaian SKP tahun sebelumnya.
7. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat pada awal tahun atau tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jam diklat per tiga bulan.
8. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi secara berkala terkait pengembangan perangkat lunak PRISMA-SKP agar Aplikasi PRISMA dapat berjalan dengan lancar.
9. Menerbitkan dan mensosialisasikan Nota Dinas terkait pentingnya memutakhirkan data SISDM dan menjelaskan *punishment* apabila tidak memutakhirkan data SISDM.
10. Melaksanakan rekomendasi yang termuat dalam Surat KASN Nomor 04/KEP.KASN/C/2020 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan BPK, antara lain dengan menyusun Kamus Kompetensi Teknis JFP (telah disetujui Menpan RB), memperluas uji kompetensi yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan talenta/kompetensi, dan membangun *talent pool* dengan menyusun rencana suksesi berdasarkan pemetaan kompetensi.

3. Penilaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. IKU Penerapan SPBE merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan bertujuan untuk mengukur level penerapan SPBE di BPK yang dikoordinasikan oleh Biro TI. Capaian Penerapan SPBE diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assesment*) oleh tim penilai mandiri SPBE BPK, yang selanjutnya akan divalidasi oleh Kementerian PAN & RB. Skala penilaian penerapan SPBB sesuai PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah sebagai berikut.

- 4,2 –5,0 : Memuaskan
- 3,5 –< 4,2 : Sangat Baik
- 2,6 –< 3,5 : Baik
- 1,8 –< 2,6 : Cukup
- < 1,8 : Kurang

Secara rinci, capaian IKU Penerapan SPBE dapat dilihat pada Tabel 101 berikut.

Tabel 99 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6 Tahun 2019-2021

IKU 2 Penilaian Penerapan SPBE	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	3,90	3,35**

IKU 2 Penilaian Penerapan SPBE	Tahun		
	2019	2020	2021
Realisasi	NA*	4,13	3,07
Capaian	NA*	105,90%	91,64%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	-1,06

* merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

** revisi target Tahun 2021 yang disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 dari Kementerian PAN & RB, realisasi Penilaian Penerapan SPBE pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,07 (Baik) atau di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,35 (Baik), sehingga capaiannya adalah sebesar 91,64%. Penyebab utama tidak tercapainya target Penilaian Penerapan SPBE pada Tahun 2021 serta turunnya realisasi dibanding Tahun 2020 terutama disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran implementasi SPBE. Sesuai Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, komponen penilaian SPBE terdiri atas 3 domain dan 35 indikator. Selanjutnya, melalui Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE terjadi penambahan satu domain (menjadi 4 domain) dan 12 indikator (menjadi 47 indikator).

Walaupun belum mencapai target, BPK telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerapan SPBE di antaranya melalui kegiatan berikut ini.

1. Melakukan integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK.
2. Melakukan penyelarasan pengembangan TIK di BPK, antara lain keselarasan dengan arsitektur SPBE dan Satu Data.
3. Menyusun perangkat lunak bidang teknologi informasi berupa kebijakan Prosedur Operasional Standar (POS) dan peraturan dengan mengacu pada proses bisnis BPK antara lain arsitektur SPBE (dengan mengembangkan *enterprise architecture* BPK), peta rencana SPBE, *Grand Design* BDA (*Big Data Analytics*), pedoman manajemen data SPBE, manajemen aset TIK, dokumen pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan pelaksanaan audit keamanan SPBE.
4. Berperan aktif dalam pengembangan teknologi informasi pemeriksaan di tingkat Internasional.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 102 berikut.

Tabel 100 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Penilaian Penerapan SPBE	3,90	3,35*	3,43	3,74	4,00	3,07	76,75%

* revisi target Tahun 2021 yang disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran

Tabel 102 menunjukkan bahwa realisasi IKU Penilaian Penerapan SPBE Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 76,75%. Diharapkan dapat ditempuh

upaya-upaya terobosan sehingga target tahunan IKU Penerapan Sistem SPBE dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

4. Opini Laporan Keuangan BPK

Indikator ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian IKU Opini Laporan Keuangan BPK diukur berdasarkan opini hasil audit atas Laporan Keuangan BPK yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.

Berdasarkan hasil audit KAP independen, Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2021 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu opini WTP, sehingga capaiannya sebesar 100%. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 103 berikut.

Tabel 101 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6 Tahun 2019-2021

IKU 4 Opini Laporan Keuangan BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-

Realisasi IKU ini pada Tahun 2021 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK, melalui Sekretariat Jenderal, telah mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 104 berikut.

Tabel 102 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Tabel 104 menunjukkan bahwa realisasi IKU Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan laporan keuangan BPK akan selalu mendapatkan opini WTP hingga Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP di antaranya melalui kegiatan berikut ini.

1. Meningkatkan kualitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
2. Meningkatkan kualitas penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

3. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Laporan Keuangan.
4. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui analisis laporan keuangan secara berkala.
5. Menyusun perangkat lunak di bidang akuntansi dan pelaporan.

5. Tingkat Kinerja Anggaran BPK

Indikator Kinerja Anggaran BPK merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja atas aspek manfaat, konteks dan implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta untuk mengukur tingkat pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada seluruh satker di BPK yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Keuangan). Capaian IKU Kinerja Anggaran BPK diukur melalui hasil penilaian atas dua dimensi pengukuran yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), di mana formula perhitungannya menggunakan komposisi nilai EKA sebesar 60% dan nilai EPA sebesar 40%.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 105.

Tabel 103 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6 Tahun 2019-2021

IKU 5 Tingkat Kinerja Anggaran BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	94%	94,50%
Realisasi	NA*	95,88%	96,11%
Capaian	NA*	102,00%	101,70%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	+0,23%

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kinerja Anggaran BPK pada Tahun 2021 sebesar 96,11% atau di atas target yang ditetapkan sebesar 94,50%, sehingga capaiannya sebesar 101,70%.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 106 berikut.

Tabel 104 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kinerja Anggaran BPK	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%	96,11%	100,11%

Tabel 106 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran BPK Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 berhasil melebihi target dengan capaian sebesar 100,11%.

Diharapkan target IKU ini dapat terus tercapai setiap tahun hingga berakhirnya Renstra di Tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi anggaran BPK di antaranya melalui kegiatan berikut ini.

1. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran kegiatan yang telah tercantum pada DIPA/POK seluruh satker melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Melakukan identifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja dan menyusun rencana aksi penanganan risiko tersebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022.
3. Memantau perkembangan capaian nilai IKPA secara berkala melalui Aplikasi OM SPAN, agar dapat melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja.
4. Berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala).
6. Secara berkala menyampaikan hasil monitoring realisasi anggaran kepada seluruh satker.

6. Indeks Kebahagiaan Pegawai

Indikator Indeks Kebahagiaan Pegawai merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan menunjukkan tingkat kebahagiaan pegawai BPK yang diukur dari empat variabel utama yaitu: 1) kebahagiaan terhadap pekerjaan, 2) kebahagiaan terhadap penghasilan, 3) kebahagiaan terhadap kesehatan, dan 4) kebahagiaan terhadap pendidikan. Indikator ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Capaian tersebut diukur melalui survei oleh lembaga independen dengan sasaran responden internal yaitu pegawai BPK dan dilaksanakan secara tahunan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 80 - 100 : Sangat Bahagia
- 60 - 79,9 : Bahagia
- 40 - 59,9 : Biasa saja
- 20 - 39,9 : Kurang Bahagia
- 0 - 19,9 : Tidak Bahagia

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 107 berikut.

Tabel 105 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6 Tahun 2019-2021

IKU 6 Indeks Kebahagiaan Pegawai	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA*	75	75
Realisasi	NA*	72,78	71,83
Capaian	NA*	97,04%	95,77%

IKU 6 Indeks Kebahagiaan Pegawai	Tahun		
	2019	2020	2021
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	-	-0,95

*merupakan IKU baru pada Renstra 2020—2024

Berdasarkan pengukuran, Indeks Kebahagiaan Pegawai pada Tahun 2021 sebesar 71,83 (bahagia) dan di bawah target yang ditetapkan sebesar 75 (bahagia), sehingga capaiannya sebesar 95,77%. Belum tercapainya target IKU ini dan penurunan realisasi dibanding Tahun 2020 adalah disebabkan rendahnya nilai dari salah satu aspek kebahagiaan yang diukur, yaitu kebahagiaan terhadap kesehatan dengan nilai sebesar 68,98. Rendahnya kebahagiaan terhadap pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang belum reda. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 108 berikut.

Tabel 106 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020—2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kebahagiaan Pegawai	75	75	75	77	78	71,83	92,09%

Tabel 108 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kebahagiaan Pegawai Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 92,09%. Diharapkan dapat ditempuh langkah-langkah terobosan sehingga kebahagiaan pegawai dapat meningkat dan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kebahagiaan pegawai di antaranya melalui kegiatan berikut ini.

1. Meningkatkan kualitas layanan bidang kepegawaian antara lain layanan kesehatan, layanan gaji dan remunerasi, layanan konsultasi dan bimbingan, serta layanan pendidikan serta peningkatan kompetensi.
2. Meningkatkan kualitas layanan klinik kesehatan serta berbagai fasilitas kebugaran untuk pegawai pada kantor pusat maupun setiap kantor perwakilan.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan perluasan beasiswa serta kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, workshop untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Mengupayakan layanan pengembangan kompetensi yang lebih baik, dengan meningkatkan administrasi layanan dan pemberian informasi tentang pengembangan kompetensi.
5. Meningkatkan layanan administrasi jabatan fungsional pemeriksa dan pembentukan jabatan fungsional lainnya di BPK.
6. Menyusun pedoman tata kelola jabatan pelaksana, sehingga jenjang jabatan dan kualifikasi pejabat pelaksana lebih jelas.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan antara lain dilakukan sosialisasi dalam bentuk *online* terkait jaminan kesehatan (BPJS) dan jaminan kesehatan tambahan mandiri pilihan (Inhealth). Dengan demikian pegawai yang

sakit tidak membebani kantor karena telah tersedia asuransi kesehatan eksternal yang iurannya dibayar secara mandiri oleh pegawai.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Sekretariat Jenderal juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 6 “Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan” yang diukur keberhasilannya melalui enam indikator kinerja utama di atas dan enam indikator kinerja generik (akan disampaikan pada subbab lainnya), **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

1. Melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK.
2. Melakukan pemetaan terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker sebagai dasar dalam menyusun pola karier pegawai.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat pada awal tahun atau tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jam diklat per tiga bulan.
4. Melakukan integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK.
5. Melakukan penyelarasan pengembangan TIK di BPK dan menyusun perangkat lunak bidang teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
7. Menyusun perangkat lunak di bidang akuntansi dan pelaporan.
8. Melakukan identifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja dan menyusun rencana aksi penanganan risiko tersebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022.
9. Meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala).
10. Mengupayakan layanan pengembangan kompetensi yang lebih baik, dengan meningkatkan administrasi layanan dan pemberian informasi tentang pengembangan kompetensi.
11. Menyusun pedoman tata kelola jabatan pelaksana, sehingga jenjang jabatan dan kualifikasi pejabat pelaksana lebih jelas.

Indikator Kinerja Generik

Selain diukur dengan Indikator-Indikator Kinerja Utama yang bersifat khusus atau spesifik untuk suatu Strategi, kinerja BPK juga diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang bersifat umum dan berlaku untuk semua strategi. Indikator yang bersifat umum tersebut disebut IKU Generik dan diukur secara simultan di seluruh Unit dan Satuan Kerja di BPK. Terdapat enam IKU generik yang telah ditetapkan untuk diukur capaiannya pada Tahun 2021. Penjelasan atas

IKU generik secara keseluruhan dan capaian indikator kinerja tersebut selama tiga tahun terakhir pada Unit dan Satuan Kerja di BPK disajikan sebagai berikut.

1. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Strategi dapat dilihat pada tabel 109 berikut.

Tabel 107 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2019-2021

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,73	4,66	4,53
		Capaian	94,60%	93,20%	90,60%
Strategi 2	AKN I	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,72	4,50
		Capaian	94,40%	94,40%	90,00%
	AKN II	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,74	4,59	4,44
		Capaian	94,80%	91,80%	88,80%
	AKN III	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,63	4,42
		Capaian	94,40%	92,60%	88,40%
	AKN IV	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,66	4,43
		Capaian	94,40%	93,20%	88,60%
	AKN V	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,56	4,44
		Capaian	94,40%	91,20%	88,80%
	AKN VI	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,74	4,53	4,44
		Capaian	94,80%	90,60%	88,80%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
	AKN VII	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,58	4,42
		Capaian	94,40%	91,60%	88,40%
	AUI	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,73	4,71	4,40
		Capaian	94,60%	94,20%	88,00%
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,73	4,66	4,58
		Capaian	94,60%	93,20%	91,60%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,51	4,44
		Capaian	94,40%	90,20%	88,80%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,74	4,71	4,50
		Capaian	94,80%	94,20%	90,00%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,73	4,50	4,54
		Capaian	94,60%	90,00%	90,80%

Berdasarkan data capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang telah disajikan, realisasi IKU pada hampir seluruh unit kerja di Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat penurunan paling besar adalah AUI dari realisasi 4,71 pada Tahun 2020 menjadi 4,40, atau turun sebesar 6,58%. AUI juga menjadi unit kerja yang memiliki capaian realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang paling rendah untuk Tahun 2021 yakni sebesar 4,40, sedangkan Itama merupakan unit kerja dengan realisasi paling tinggi sebesar 4,58. Satu-satunya unit kerja yang mencapai kenaikan realisasi tahun ini adalah Sekretariat Jenderal, dari realisasi sebesar 4,50 pada 2020, menjadi 4,54 atau naik sebesar 0,04.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 108 - Perbandingan Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,53	90,60%
Strategi 2	AKN I	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	90,00%

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 2	AKN II	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,44	88,80%
	AKN III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,42	88,40%
	AKN IV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,43	88,60%
	AKN V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,44	88,80%
	AKN VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,44	88,80%
	AKN VII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,42	88,40%
	AUI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	88,00%
Strategi 3	Inspektorat Utama	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,58	91,60%
Strategi 4	Badiklat PKN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,44	88,80%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	90,00%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,54	90,90%

Secara umum, untuk IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK ini seluruh unit kerja belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 5,0, dengan realisasi rata-rata unit kerja adalah sebesar 4,47. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari proses internalisasi kepada pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar, dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan masih kurang. Agar IKU ini dapat terpenuhi pada akhir periode Renstra 2020 – 2024, seluruh Unit Kerja perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif, mengadakan *coaching* dan mentoring kepada pegawai, agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari.

2. Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di seluruh satuan kerja. Pengukuran indikator ini sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, dimana nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Strategi dapat dilihat pada tabel 111 berikut.

Tabel 109 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019-2021

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	AA (92,79)	AA (93,86)
		Capaian	90%	107,89%	105%
Strategi 2	AKN I	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	A (85,82)	A (87,35)
		Capaian	90%	99,79%	100,40%
	AKN II	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	A (89,44)	A (89,63%)
		Capaian	90%	104%	103,02%
	AKN III	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	AA (91,83)	AA (92,70)
		Capaian	90%	106,78%	105,00%
	AKN IV	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	AA (90,50)	AA (91,24)
		Capaian	90%	105,23%	104,87%
	AKN V	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	AA (91,57)	AA (94,87)
		Capaian	90%	106,47%	105,35%
	AKN VI	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	BB	A (89,19)	AA (93,16)
		Capaian	80%	103,71%	105,00%
	AKN VII	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	A (89,22)	AA (92,46)
		Capaian	90%	103,75%	105,00%
AUI	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)	
	Realisasi	A	A (92,24)	AA (96,48)	
	Capaian	90%	107,26%	107,14%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	AA	A (90,76)	AA (95,94)
		Capaian	100%	105,53%	106,54%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	AA (92,38)	AA (92,59)
		Capaian	90%	107,42%	105,00%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	A (89,54)	AA (96,33)
		Capaian	90%	104,12%	106,97%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
		Realisasi	A	AA (94,94)	AA (95,95)
		Capaian	90%	110,40%	106,55%

Berdasarkan data capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP yang disajikan pada tabel diatas, realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP pada seluruh unit kerja di Tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unit kerja dengan capaian paling tinggi untuk IKU Hasil Evaluasi AKIP pada tahun ini adalah AUI yaitu sebesar 96,48. Unit kerja dengan tingkat kenaikan realisasi paling tinggi adalah Ditama Binbangkum dari 89,54 pada tahun 2020 menjadi 96,33 pada tahun 2021 atau naik sebesar 7,6%. Seluruh unit kerja telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 87,00 dan mengalami kenaikan capaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa unit kerja telah optimal dalam melakukan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerjanya dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 110 - Perbandingan Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (93,86)	104,23%
	AKN I	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (87,35)	97,00%
Strategi 2	AKN II	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (89,63%)	99,53%
	AKN III	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (92,70)	102,94%
	AKN IV	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (91,24)	101,32%

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 3	AKN V	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (94,87)	105,35%
	AKN VI	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (93,16)	103,45%
	AKN VII	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (92,46)	102,68%
	AUI	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (96,48)	107,14%
	Inspektorat Utama	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (95,94)	106,54%
Strategi 4	Badiklat PKN	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (92,59)	102,82%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (96,33)	106,97%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (95,95)	106,55%

Berdasarkan perbandingan capaian tahun 2021 terhadap proyeksi target tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing Strategi, hanya satu Strategi yang belum tercapai yaitu Strategi 2 untuk AKN I (97%) dan AKN II (99,53%). Unit kerja yang telah memenuhi capaian IKU ini diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja dengan tetap fokus menyusun perencanaan, melakukan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Hal tersebut akan dapat mendorong unit kerja lain yang belum memenuhi capaian IKU ini untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Dengan demikian, pemenuhan IKU ini dapat dicapai oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra Tahun 2020 – 2024.

3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian tersebut diukur berdasarkan pemanfaatan layanan dasar (*email, edrive, porta*), layanan aplikasi umum (SISDM) dan pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan. Khusus untuk aplikasi manajemen pengetahuan belum diukur pemanfaatannya pada Tahun 2021 karena sedang dalam tahap pembangunan, sementara untuk Unit Kerja Pemeriksaan juga termasuk pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan SiAP).

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Strategi dapat dilihat pada tabel 113 berikut.

Tabel 111 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2018-2020

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,62%	99,69%	99,62%
		Capaian	104,86%	104,93%	103,77%
Strategi 2	AKN I	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99%	99,17%	99,17%
		Capaian	104,21%	104,39%	103,30%
	AKN II	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,18%	99,31%	99,31%
		Capaian	104,40%	104,54%	103,45%
	AKN III	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	98,56%	98,80%	98,80%
		Capaian	103,75%	104%	102,92%
	AKN IV	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,43%	99,41%	99,41%
		Capaian	104,66%	104,64%	103,55%
	AKN V	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	98,84%	99,10%	99,10%
		Capaian	104,04%	104,32%	103,23%
	AKN VI	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,08%	96,21%	100%
		Capaian	104,29%	101,27%	104,17%
	AKN VII	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,24%	99,37%	99,37%
		Capaian	104,46%	104,60%	103,51%
AUI	Target	95%	95%	96%	
	Realisasi	99,59%	99,66%	99,66%	
	Capaian	104,83%	104,91%	103,81%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	100%	100%	100%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
		Capaian	105,26%	105,26%	104,17%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,03%	99,19%	99,19%
		Capaian	104,24%	104,41%	103,32%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	99,21%	99,34%	99,34%
		Capaian	104,43%	104,57%	103,48%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	95%	95%	96%
		Realisasi	98,40%	98,67%	98,67%
		Capaian	103,58%	103,86%	102,78%

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI yang telah disajikan, secara umum realisasi IKU ini di Tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya, kecuali realisasi AKN VI yang mengalami kenaikan sebesar 3,79% dari 96,21% pada tahun 2020 menjadi 100% pada Tahun 2021. Selain itu pada tahun ini, terdapat dua unit kerja yang mencapai realisasi tertinggi 100% yaitu AKN VI dan Itama. Sedangkan Unit Kerja dengan realisasi yang paling rendah adalah Sekretariat Jenderal sebesar 98,67%. Meskipun demikian, realisasi Sekretariat Jenderal telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yakni sebesar 96%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah memanfaatkan layanan TIK secara optimal yang ditandai dengan tingginya kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 112 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	95%	96%	97%	98%	100%	99,62%	99,62%
	AKN I	95%	96%	97%	98%	100%	99,17%	99,17%
Strategi 2	AKN II	95%	96%	97%	98%	100%	99,31%	99,31%
	AKN III	95%	96%	97%	98%	100%	98,80%	98,80%
	AKN IV	95%	96%	97%	98%	100%	99,41%	99,41%
	AKN V	95%	96%	97%	98%	100%	99,10%	99,10%

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 3	AKN VI	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
	AKN VII	95%	96%	97%	98%	100%	99,37%	99,37%
	AUI	95%	96%	97%	98%	100%	99,66%	99,66%
	Inspektorat Utama	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
Strategi 4	Badiklat PKN	95%	96%	97%	98%	100%	99,19%	99,19%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	95%	96%	97%	98%	100%	99,34%	99,34%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	95%	96%	97%	98%	100%	98,67%	98,67%

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024, terdapat dua Unit Kerja yang telah mencapai target Tahun 2024 yaitu AKN VI untuk Strategi 2 dan Itama untuk Strategi 3. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam memanfaatkan TI masih perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai *user*. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra Tahun 2020 – 2024.

4. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini menunjukkan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktikkan manajemen pengetahuan. khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan.

Proses identifikasi pengetahuan mencakup praktik terbaik (*Best Practice*), yaitu setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satuan kerja yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *Best Practice* (BP). Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan berbagi pengetahuan atau *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuvi pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi (*Community of Practice*), wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan (*coaching*), dan mentoring, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Capaian atas IKU ini diukur dengan menghitung tingkat penyusunan *Best Practice*, tingkat penerapan *Best Practice*, dan tingkat pelaksanaan aktivitas *Knowledge Management* sesuai dengan proporsi pada formulasinya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 115 berikut.

Tabel 113 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2018-2020

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	100%	100%
		Capaian	N/A	100%	100%
Strategi 2	AKN I	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	8,33%	25%
		Capaian	N/A	8,33%	25%
	AKN II	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	75%	75%
		Capaian	N/A	75%	75%
	AKN III	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	100%	75%
		Capaian	N/A	100%	75%
	AKN IV	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	58,33%	88,54%
		Capaian	N/A	58,33%	88,54%
	AKN V	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	94,47%	112,45%
		Capaian	N/A	94,47%	112,45%
	AKN VI	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	102,63%	102,98%
		Capaian	N/A	102,63%	102,98%
	AKN VII	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	75%	100%
		Capaian	N/A	75%	100%
AUI	Target	N/A	100%	100%	
	Realisasi	N/A	100%	100%	
	Capaian	N/A	100%	100%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	129,17%	75%
		Capaian	N/A	129,17%	75%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	100%	100%
		Capaian	N/A	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	112,50%	100%
		Capaian	N/A	112,50%	100%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	N/A	100%	100%
		Realisasi	N/A	79,17%	83,33%
		Capaian	N/A	79,17%	83,33%

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang telah disajikan, beberapa unit kerja belum mencapai target realisasi IKU ini di Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian unit kerja belum dapat menerapkan manajemen pengetahuan di masing-masing unit kerjanya dengan optimal. Beberapa Unit Kerja yang belum mencapai target realisasi yaitu Strategi 2 (AKN I, II, III, dan IV), Strategi 3 (Itama), dan Strategi 6 (Sekretariat Jenderal). Penyebab belum tercapainya target IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan adalah beberapa satuan kerja di bawah unit kerja tersebut tidak memberikan usulan *best practice* maupun mereplikasi *best practice*, dan tidak melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 114 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AKN I	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
Strategi 2	AKN II	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
	AKN III	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
	AKN IV	100%	100%	100%	100%	100%	88,54%	88,54%
	AKN V	100%	100%	100%	100%	100%	112,45%	112,45%
	AKN VI	100%	100%	100%	100%	100%	102,98%	102,98%
	AKN VII	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AUI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3	Inspektorat Utama	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 4	Badiklat PKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	83,33%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, Unit Kerja yang belum mencapai target yaitu Strategi 2 (AKN I, II, III, dan IV), Strategi 3 (Itama), dan Strategi 6 (Sekretariat Jenderal). Dengan peningkatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan oleh Direktorat PSMK mengenai berbagai jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan secara berkesinambungan, diharapkan IKU ini akan dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra Tahun 2020 – 2024.

5. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK yaitu 40 JP setahun untuk pemeriksa, dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa (Penunjang pendukung dan Jabatan Fungsional lainnya). *Cut off* perhitungan jumlah jam pendidikan pegawai adalah 30 September, sehingga dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satuan kerja baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satuan kerja baru, dan jika pegawai aktif setelah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satuan kerja yang lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 117 berikut.

Tabel 115 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2018-2020

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	98,69%	100%
		Capaian	100%	98,69%	100%
Strategi 2	AKN I	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	97,13%	94,30%	100%
		Capaian	97,13%	94,30%	100%
	AKN II	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	99,33%	76,87%	100%
		Capaian	99,33%	76,87%	100%
	AKN III	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	81,64%	99,62%	99,32%
		Capaian	81,64%	99,62%	99,32%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
	AKN IV	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	94,74%	100%	100%
		Capaian	94,74%	100%	100%
	AKN V	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	96,64%	97,55%	99,26%
		Capaian	96,64%	97,55%	99,26%
	AKN VI	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	94,76%	93,55%	98,69%
		Capaian	94,76%	93,55%	98,69%
	AKN VII	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	94,93%	95,02%	98,49%
		Capaian	94,93%	95,02%	98,49%
	AUI	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%
		Capaian	100%	100%	100%
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	98,92%	100%	98,90%
		Capaian	98,92%	100%	98,90%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%
		Capaian	100%	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	98,67%	98,65%
		Capaian	100%	98,67%	98,65%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	93,14%	97,69%	100%
		Capaian	93,14%	97,69%	100%

Berdasarkan data capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang telah disajikan, realisasi IKU ini pada Strategi 2 (AKN III), Strategi 3, dan Strategi 5 di Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan capaian indikator ini adalah belum optimalnya pelaksanaan manajemen diklat pada unit kerja terkait dan juga masih adanya kesulitan untuk mengelola prioritas antara pekerjaan pegawai dan jadwal diklat.

Sebaliknya, realisasi IKU pada Ditama Revbang, AKN I, AKN II, AKN V, AKN VI, AKN VII, dan Sekretariat Jenderal di Tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unit Kerja Revbang, sebagian besar Unit Kerja Pemeriksaan, dan Sekretariat Jenderal telah menerapkan manajemen diklat yang

baik di satuan kerja masing-masing, sehingga para pegawai tetap dapat mengikuti diklat di tengah rutinitas pekerjaan yang padat. Salah satu manajemen diklat yang dapat diterapkan oleh Unit Kerja yang belum mencapai target adalah dengan secara proaktif melakukan *monitoring* atas pelaksanaan diklat para pegawainya, dan juga koordinasi yang baik dengan Badiklat PKN untuk menginformasikan ketersediaan waktu untuk diklat para pegawainya, serta memperoleh jadwal diklat yang sesuai.

Sementara itu, Badiklat PKN sebagai unit pengampu Strategi 4, serta sebagian pengampu Strategi 2 (AKN IV dan AUI) masih dapat mempertahankan realisasi IKU ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%. Terpenuhinya IKU ini secara sempurna oleh unit kerja tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi unit kerja lain untuk memastikan manajemen diklat di unit kerja tersebut berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan rutinitas dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 116 - Perbandingan Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020–2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 2	AKN I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AKN II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AKN III	100%	100%	100%	100%	100%	99,32%	99,32%
	AKN IV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AKN V	100%	100%	100%	100%	100%	99,26%	99,26%
	AKN VI	100%	100%	100%	100%	100%	98,69%	98,69%
	AKN VII	100%	100%	100%	100%	100%	98,49%	98,49%
	AUI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3	Inspektorat Utama	100%	100%	100%	100%	100%	98,90%	98,90%
Strategi 4	Badiklat PKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	100%	100%	100%	100%	100%	98,65%	98,65%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seperti ditunjukkan table di atas, terdapat tujuh entitas yang telah mencapai target 2024. Baik unit kerja yang telah mencapai atau belum mencapai target diharapkan dapat menyusun manajemen diklat yang baik sehingga diklat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan rutinitas dan tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan seluruh Unit Kerja dapat mencapai IKU ini pada akhir periode Renstra Tahun 2020 – 2024.

6. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, capaian atas indikator ini diukur dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang didasarkan atas empat hal, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian output, dan efisiensi. Namun, khusus untuk unit kerja Badan Diklat PKN selaku pengelola DIPA, nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) juga diukur selain nilai EKA. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 119 berikut.

Tabel 117 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2019-2021

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	83%	83%	83,5%
		Realisasi	82,90%	84,43%	88,18%
		Capaian	99,88%	101,72%	105,00%
Strategi 2	AKN I	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	39,47%	67,21%	97,46%
		Capaian	49,34%	80,98%	113,72%
	AKN II	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	75,76%	84,37%	86,10%
		Capaian	94,70%	101,65%	103,11%
	AKN III	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	83,59%	87,64%	85,78%
		Capaian	104,49%	105,59%	102,73%
	AKN IV	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	39,47%	92,48%	86,06%
		Capaian	49,34%	11,42%	103,07%
	AKN V	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	86,43%	85,07%	86,23%
		Capaian	108,04%	102,49%	103,27%
	AKN VI	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	65,88%	91,16%	86,69%
		Capaian	82,35%	109,83%	103,82%
	AKN VII	Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	36,72%	65,03%	75,08%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2019	2020	2021
	AUI	Capaian	45,90%	78,34%	89,92%
		Target	80%	83%	83,5%
		Realisasi	75,46%	92,79%	92,50%
		Capaian	94,32%	111,79%	107,93%
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	83%	83%	83,5%
		Realisasi	83,18%	86,08%	87,96%
		Capaian	100,22%	103,71%	105,00%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	83%	87%	87,5%
		Realisasi	80,94%	89,69%	89,84%
		Capaian	97,52%	103,09%	102,67%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	83%	83%	83,5%
		Realisasi	79,43%	84,72%	80,80%
		Capaian	95,69%	102,07%	96,77%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	83%	83%	83,5%
		Realisasi	73,64%	87,54%	84,47%
		Capaian	88,72%	105,47%	101,16%

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran yang telah disajikan, selain Strategi 2 (AKN VII) dan Strategi 5 (Ditama Binbangkum), realisasi IKU pada seluruh strategi di Tahun 2021 telah mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan secara optimal di seluruh unit kerja. Akan tetapi, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait penganggaran berbasis kinerja ini tetap perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan unit kerja sampai dengan pelaksana. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2021 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 118 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	88,18%	102,89%
	AKN I	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	97,46%	113,72%
	AKN II	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	86,10%	100,47%
Strategi 2	AKN III	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	85,78%	100,09%
	AKN IV	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	86,06%	100,42%
	AKN V	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	86,23%	100,62%

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 3	AKN VI	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	86,69%	101,16%
	AKN VII	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	75,08%	87,61%
	AUI	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	92,50%	107,93%
	Inspektorat Utama	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	87,96%	102,64%
Strategi 4	Badiklat PKN	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	89,84%	101,29%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	80,80%	94,28%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	84,47%	98,56%

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024, maka terdapat tiga Strategi yang belum tercapai yaitu Strategi 2 (AKN VII), Strategi 5 (Ditama Binbangkum), dan Strategi 6 (Sekretariat Jenderal). Dengan sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan IKU ini dapat terpenuhi oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra 2020 – 2024.

B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan dukungan pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN sehingga kebijakan pemerintah sangat memengaruhi pengelolaan anggaran BPK. Sebagai respon terhadap pemotongan anggaran oleh Pemerintah dan amanat Pimpinan BPK dalam merespon kondisi kenormalan baru, maka dilakukan penajaman Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) BPK. Kondisi ini berdampak pada anggaran yang dikelola oleh Unit Kerja dalam menjalankan Sasaran Strategis dan Strategi. Selama tahun 2021, BPK mengajukan lima kali revisi anggaran dengan pertimbangan adanya kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja BPK, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Anggaran BPK dialokasikan untuk dua program yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program

generik. Pada Tahun 2021, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran senilai Rp3.667.714.850.037,00 atau sebesar 98,83% dari anggaran yang dialokasikan senilai Rp3.711.236.045.000. Perincian pemanfaatan anggaran BPK per Strategi pada tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 121 berikut.

Tabel 119 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran tahun 2021 atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi		3.711.236.045.000	3.667.714.850.037	98,83%	
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan</i>	08	<i>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</i>	<i>3,049,323,483,000</i>	<i>3,010,960,468,626</i>	<i>98.74%</i>
	1159	Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	1,700,452,591,000	1,697,238,390,343	99.81%
Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis	1156	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	9,148,347,000	9,129,863,025	99.80%
	1157	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	7,571,690,000	7,569,052,002	99.97%
	1158	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	6,112,093,000	6,077,147,642	99.43%
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	1,194,579,207,000	1,166,802,299,349	97.67%
	2039	Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara	20,139,653,000	19,262,712,883	95.65%
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara	1153	Pengawasan oleh Inspektorat	10,700,213,000	10,595,296,563	99.02%
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	1167	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	86,059,666,000	80,070,425,974	93.04%

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1154	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	8,538,496,000	8,246,892,295	96.58%
	1155	Pelayanan Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum	6,021,527,000	5,968,388,550	99.12%
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi</i>	<i>01</i>	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK</i>	<i>661,912,562,000</i>	<i>656,754,381,411</i>	<i>99.22%</i>
Strategi 6 – Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan	1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	44,013,666,000	43,701,499,237	99.29%
	1033	Manajemen SDM	285,526,757,000	281,646,269,825	98.64%
	1034	Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Negara	19,050,580,000	19,035,572,559	99.92%
	1152	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	175,215,855,000	175,089,702,928	99.93%
	2045	Pelayanan Kesekretariatan Badan	65,960,423,000	65,276,089,008	98.96%
	2046	Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	72,145,281,000	72,005,247,854	99.81%

Pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis dan Strategi BPK dimuat dalam dua program penganggaran yaitu Program 01 tentang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK dan Program 08 tentang Program Pemeriksaan Keuangan Negara. Masing-masing program mendukung pelaksanaan kegiatan untuk ketercapaian target kinerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis maupun Strategi. Dukungan kedua program penganggaran tersebut ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 14 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja

Seperti tertera pada Gambar 13, Program Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas 10 kegiatan yang mendukung pencapaian Strategi 1 sampai dengan 5 sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK meliputi enam kegiatan yang mendukung pencapaian Strategi 6.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut mengharuskan entitas Pemerintah dan Lembaga negara untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Salah satu aspek yang diukur dalam Evaluasi Kinerja Anggaran adalah tingkat efektivitas dan efisiensi. Selain itu Evaluasi Kinerja anggaran juga mengharuskan identifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021, pengukuran efisiensi dalam evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran per keluaran dan realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran

dan target volume keluaran. Hasil pengukuran efisiensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 15 berikut.



Gambar 15 – Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2021

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selama Tahun 2021, selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional, di antaranya sebagai berikut.

1. BPK terpilih sebagai Wakil Ketua *United Nation (UN) Panel of External Auditors*

BPK melalui Ketua BPK terpilih sebagai Wakil Ketua *Panel of the External Auditors of the UN, the Specialized Agencies, and the International Atomic Energy Agency* (disingkat *United Nation (UN) Panel of External Auditors*) untuk tahun 2022. Melalui proses pemilihan yang berlangsung dalam pertemuan *61st Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations*, terpilih *Comptroller General of the Republic of Chile* sebagai Ketua Panel dan Ketua BPK sebagai Wakil Ketua Panel.

UN Panel of External Auditors dibentuk berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB 1438 (XIV) tanggal 5 Desember 1959. Keanggotaan Panel terdiri dari pemeriksa eksternal PBB,

pemeriksa eksternal Badan-Badan Khusus dibawah naungan PBB (seperti pemeriksa eksternal ILO, FAO, WHO, dll), dan pemeriksa eksternal IAEA. Saat ini terdapat tiga belas Supreme Audit Institution (SAI) yang menjadi anggota UN *Panel of External Auditors* adalah (1) Inggris, (2) Kanada, (3) Swiss, (4) Chili, (5) China, (6) Perancis, (7) Jerman, (8) India, (9) Italia, (10) Rusia, (11) Filipina, (12) Indonesia, (13) Ghana, dan satu SAI pemantau yaitu Tanzania. Tujuan dari Panel ini adalah sebagai forum koordinasi dan berbagi informasi atas metodologi pemeriksaan dan temuan-temuan pemeriksaan dari pemeriksa eksternal.

Hasil pekerjaan UN *Panel of External Auditors* akan disampaikan kepada pimpinan entitas di bawah PBB untuk selanjutnya ditindaklanjuti, khususnya yang terkait dengan isu-isu yang relevan untuk perbaikan tata kelola. Pimpinan entitas/organisasi internasional dibawah naungan PBB tersebut juga dapat meminta agar Panel memberikan pendapat atau rekomendasi dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang signifikan. Saat ini BPK menjadi SAI pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang memegang dua jabatan strategis di bidang audit organisasi internasional, yakni Ketua BPK sebagai *Vice Chairman UN Panel of External Auditors* dan Wakil Ketua BPK sebagai *Vice Chairman United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN-IAAC)*. UN-IAAC merupakan Auditor Internal PBB sedangkan yang menangani koordinasi sedangkan UN *Panel of External Auditors* menangani pemeriksaan eksternal untuk seluruh entitas di bawah PBB. Dengan terpilihnya BPK sebagai wakil ketua UN *Panel of External Auditors* dan UN-IAAC maka semakin mempertegas peran aktif dan kontribusi BPK pada dunia internasional, khususnya di bidang pemeriksaan organisasi-organisasi internasional yang terafiliasi dengan PBB.

2. BPK diundang untuk bergabung dalam proyek "*The Chandler Sessions on Integrity and Corruption*"

BPK melalui Ketua BPK diundang untuk bergabung dalam proyek "*The Chandler Sessions on Integrity and Corruption*" bersama dengan peserta dari berbagai negara. Proyek yang diadakan oleh Blavatnik School of Government, University of Oxford tersebut bertujuan untuk mengembangkan strategi terbaru bersama untuk memerangi korupsi dan mempromosikan budaya integritas di seluruh sektor publik.

Pada pertemuan yang berlangsung pada 26 s.d. 27 Juli 2021 tersebut, Ketua BPK memberikan pernyataan mengenai independensi BPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya pada hari kedua, Ketua BPK ikut serta melakukan pembahasan terkait pengukuran kesuksesan atau kemajuan penanganan korupsi dan kemitraan strategis antar pemerintah dalam memerangi korupsi.

Sebanyak 15 peserta *The Chandler Sessions* diharapkan untuk menulis paling tidak satu makalah yang menjelaskan gagasan dan praktik pencegahan korupsi di lapangan. Mereka juga dapat menulis bersama dengan peserta lain atau dengan para akademisi. The Blavatnik School of Government dan mitra kemudian akan mendistribusikan makalah yang telah selesai. Nantinya, makalah-makalah tersebut akan menjadi salah satu materi kurikuler tentang integritas dan korupsi. Makalah akan dibahas bersama Profesor Christopher Stone dan rekan peneliti pasca-doktoral.

Keikutsertaan BPK dalam *The Chandler Sessions on Integrity and Corruption* menunjukkan bahwa kapasitas BPK diakui dalam upaya memerangi korupsi dan mempromosikan budaya integritas di sektor publik di kancah internasional.

3. BPK melakukan inisiatif pembentukan SAI 20

Untuk mendukung peran Pemerintah Republik Indonesia yang memegang Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 sampai Oktober 2022, BPK berinisiatif untuk membentuk SAI20. Pembentukan SAI20 ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi antara SAI negara-negara G20 dan *stakeholder* untuk memberikan peran *oversight, insight, dan foresight* dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama yang lebih kuat pasca pandemi COVID-19 dan mendukung upaya implementasi SDGs.

Untuk mewujudkan pembentukan SAI20 tersebut, BPK telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Selain itu, BPK juga melakukan pertemuan bilateral dengan para SAI anggota G20 untuk menyampaikan gagasan pembentukan SAI20 dalam rangka perolehan dukungan.

4. BPK merumuskan *foresight* membangun kembali Indonesia pasca covid-19



Tahun 2021 merupakan kali pertama BPK meluncurkan *foresight*, pandangan tentang kondisi masa depan untuk dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. Tema utama dari pendapat strategis tersebut: "Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh".

BPK sebagai satu-satunya pemeriksa eksternal pemerintah, telah berkecimpung dalam pekerjaan *oversight* (bersifat *watchdog*) dan *insight* (untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah). SAI perlu melakukan *foresight* yang memberikan pandangan kepada pemerintah dan legislatif mengenai tantangan dan peluang

negara di masa depan. Dengan disusunnya *foresight* ini, BPK menjadi SAI ke-2 di Asia setelah Korea Selatan atau yang pertama di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan *Foresight*.

Foresight memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan, serta identifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.

Beberapa tujuan yang ingin dicapai BPK melalui peran *foresight* adalah membantu penyelenggara negara dengan menyediakan informasi yang berguna dalam membuat kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan negara, sebagai alternatif pilihan kebijakan

yang dapat diambil pemerintah, fasilitas pembuatan kebijakan dari BPK dalam situasi yang penuh ketidakpastian serta sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah.

Selain capaian tersebut di atas, pada tahun 2021 BPK memperoleh beberapa penghargaan kelembagaan dalam negeri. Penghargaan tersebut menunjukkan apresiasi dari para pemangku kepentingan eksternal terhadap kinerja BPK selama tahun 2021.

Berikut ini adalah penghargaan kelembagaan yang didapatkan BPK selama tahun 2021.

1. Penghargaan "Silver Winner" untuk majalah Warta Pemeriksa edisi Maret 2020 dari PR Indonesia untuk Kategori Lembaga Sub Kategori Media Cetak. Penghargaan disampaikan dalam *The 6th Public Relations Indonesia Award 2021* yang ditayangkan melalui *live streaming* di kanal Youtube PR Indonesia Magazine pada 31 Maret 2021.



2. Penghargaan "BKN Award 2020" untuk kategori Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik dari Badan kepegawaian Negara (BKN). Penghargaan ini diberikan pada 1 Juli 2021.



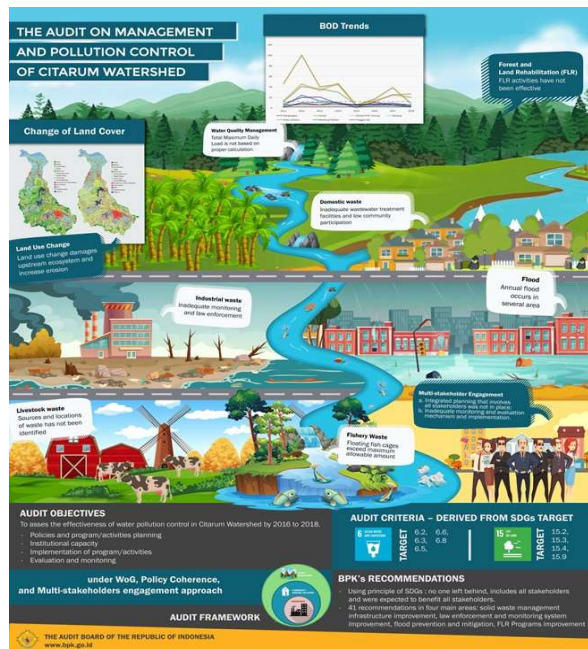
3. Pada 26 Oktober 2021, BPK mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan publik yang "Informatif". Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Predikat ini merupakan peningkatan dari capaian tahun 2020 yaitu "Menuju Informatif" dan merupakan klasifikasi tertinggi yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh KIP.



4. BPK meraih Peringkat Kedua Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam kategori pagu sedang dengan nilai kinerja anggaran TA 2020 sebesar 95,88 (sangat baik) dari Kementerian Keuangan. Kementerian negara/lembaga yang diberikan piagam penghargaan adalah yang memperoleh nilai kinerja anggaran dalam kategori sangat baik (lebih dari 90,00)



5. BPK berhasil memperoleh penghargaan *INTOSAI WGEA Award—Inspiration in Environmental Auditing* untuk kategori visualisasi terbaik. Penghargaan tersebut diberikan terhadap infografis laporan hasil pemeriksaan atas DAS Citarum (*The Audit on Management and Pollution Control of Citarum Watershed*) yang diterbitkan pada tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan oleh INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) pada Januari 2021 untuk mendorong SAI di seluruh dunia agar menggunakan cara-cara yang menarik dan jelas dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaan.



D. Tantangan Masa Depan

Bagi BPK yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan banyak pekerjaan lapangan dan berinteraksi dengan banyak pihak eksternal, tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan karena Pandemi Covid-19 belum berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan kinerja BPK di tengah-tengah situasi Pandemi. Upaya-upaya tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh BPK terutama dengan adanya dinamika organisasi saat ini.

Tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh BPK dalam upaya mempertahankan kinerja dan menjaga keselarasan dengan dinamika organisasi dalam mencapai tujuan organisasi antara lain sebagai berikut.

1. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 mengharuskan adanya perubahan cara kerja baru (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan melakukan sistem kerja dari rumah (*work from home*), *remote* audit, *e-learning* atau *distance learning*, dan lain sebagainya.

2. Transformasi *Big Data Analytic* (BDA)

Penggunaan *big data* pada sebagian besar SAI masih terbatas pada *introductory phase of implementing BDA*. Meskipun demikian, beberapa SAI telah menggunakan *big data* untuk menjadikan audit lebih efisien dan efektif. Mengacu pada kondisi tersebut, SAI diharapkan mampu mendesain *big data governance framework* yang diperlukan untuk membantu SAI dalam memanfaatkan *big data* dalam mencapai tujuan audit. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data yang komprehensif.

Implementasi BDA memiliki tantangan tersendiri karena *big data* memiliki ciri-ciri jumlah data yang sangat besar (*volume*), cepat berubah (*velocity*), datanya bervariasi atau terdiri atas data terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak terstruktur (*variability*), dan kualitas data yang bervariasi karena berasal dari berbagai macam sumber (*veracity*). Untuk itu, dalam pengembangan BDA diperlukan kemampuan olah data (misalnya *data mining* dan *data modelling*), *identity management*, dan *fraud analytics* yang mumpuni. Selain itu diperlukan juga kemampuan analisis data (analisis risiko, analisis text, *content analysis*, *statistical analysis*, *predictive analysis*, dan *social media analysis*) yang memadai. BDA juga memerlukan pelaporan yang memadai dalam bentuk visualisasi data, *dashboard*, *real time reporting* dan *insight* dari hasil analisis data.

Oleh karena pengembangan BDA memerlukan sumber daya yang besar, pengembangan BDA dimasukkan menjadi salah satu fokus Renstra BPK Tahun 2020-2024. Dalam Renstra, Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data Analytics* dijadikan Inisiatif Strategis (IS) BPK dengan pengampu AKN II. Seluruh Pimpinan BPK telah memberikan arahan dan harapan untuk implementasi IS tersebut dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan kebijakan kelembagaan BPK. Mengingat pentingnya dan manfaat yang besar dari penggunaan BDA, BPK telah memiliki *grand design* BPK Big Data Analytics (Bidics). Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

3. Kendala Hukum Penggantian Kerugian Negara/Daerah

Salah satu rangkaian pemeriksaan BPK ialah penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beragam tantangan dan upaya kecurangan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan yang harus dibenahi oleh BPK baik saat ini maupun di masa mendatang. Saat ini, BPK mendorong penyelesaian ganti kerugian negara/daerah melalui sosialisasi yang gencar hingga ke berbagai daerah di Indonesia. BPK juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian

ganti kerugian negara/daerah, antara lain Tim Penyelesaian Kerugian Negara atau Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD).

4. Kendala Tuntutan Hukum atas Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan

BPK memiliki risiko hukum yaitu berupa tuntutan hukum, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Dalam menangani kasus hukum tersebut, BPK mengalami sejumlah tantangan, utamanya terkait dengan proses pembuktian di persidangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, telah dilakukan sejumlah upaya dalam rangka mitigasi risiko yang perlu dilakukan secara berkesinambungan. Diharapkan upaya tersebut dapat memberikan pemahaman kepada pemeriksa mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pada saat pemeriksaan untuk meminimalisir risiko adanya tuntutan hukum.

5. Pengembangan BPK *Enterprise Architecture*

Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah memasuki era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, sistem informasi dan teknologi menjadi komponen yang penting bagi keberhasilan BPK. Pengembangan *enterprise architecture* menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. *Enterprise architecture* atau arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan masa depan, BPK berinisiasi mengembangkan suatu model peta konseptual struktur dan operasionalisasi BPK yang dibangun menggunakan *framework* yang diselaraskan dengan *Supreme Audit Institution – Performance Measurement Framework* (SAI-PMF) untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara efisien.

PENUTUP



Laporan Kinerja BPK Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Laporan kinerja memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh satuan kerja. BPK telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan dalam pengelolaan kinerja organisasi. Pelaksanaan ketiga jenis manajemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Dengan sinergi dan kolaborasi manajemen kinerja, risiko, pengetahuan dan perubahan, pencapaian tujuan organisasi yang diamanatkan dalam Renstra BPK 2020-2024 dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2021, pencapaian skor kinerja BPK pada tahun 2021 secara keseluruhan adalah **102,47** atau meningkat apabila dibandingkan skor kinerja tahun 2020 sebesar **98,68**. Pada Tahun 2021, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran senilai **Rp3.667.714.850.037,00** atau sebesar 98,83% dari anggaran yang dialokasikan senilai **Rp3.711.236.045.000**.

Berdasarkan hasil *monitoring* atas pencapaian kinerja Tahun 2021, dari tiga indikator kinerja BPK *Wide*, 47 indikator di masing-masing Strategi (Strategi 1 s.d. Strategi 6) dan enam indikator kinerja generik, masih terdapat satu indikator kinerja yang masih belum dapat dilakukan pengukuran. Indikator tersebut adalah **Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics***. Pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics* masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang kompleks mulai dari pengembangan kapasitas teknologi, *data collecting* dan *data catalogue*, pengembangan *model analytics*, dan pada akhirnya pada pemanfaatan *Big Data Analytics* dalam kegiatan pemeriksaan, penunjang, dan pendukung. Pemanfaatan *Big Data Analytics* akan didorong sehingga tingkat pemanfaatannya dapat diukur pada tahun berikutnya.

Dalam upaya mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis BPK 2020-2024, BPK memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja saat ini. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain penyempurnaan aplikasi pengukuran kinerja, penyempurnaan formula pengukuran indikator kinerja, peningkatan kompetensi SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2021 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.



Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2549990 Ext 3265
Fax. (021) 5705376
www.bpk.go.id